

# LAPORAN KINERJA

PEMERINTAH KOTA MALANG

# TAHUN 2024



"Pemkot Malang, bersama masyarakat, mengukir langkah progresif tahun 2024: dari pembangunan infrastruktur, ekonomi, hingga penguatan kearifan lokal. Setiap inovasi adalah benih untuk mewujudkan 'Malang Menuju Mbois Berkelas' yang tak hanya maju di papan statistik, tetapi juga hangat dalam kebersamaan."



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
MENUJU MALANG MBOIS DAN BERKELAS



[www.malangkota.go.id](http://www.malangkota.go.id)



Pemerintah Kota Malang



@PemkotMalang



# PEMERINTAH KOTA MALANG

## INSPEKTORAT DAERAH

JALAN GAJAHMADA NOMOR 2A TELP. (0341) 364450 – FAX. 321276  
MALANG

Kode Pos 65113

Malang, 14 Februari 2025

Nomor : 700.1.2.1/148/35.73.300/2025  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Sifat : Segera  
Perihal : Laporan Hasil Reviu atas  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
(LKjIP) Tahun 2024

Kepada:  
Yth. Pj. Walikota Malang  
di  
**MALANG**

Sehubungan dengan amanat penyusunan LKjIP pada Perangkat Daerah (PD) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka memberikan jaminan atas informasi kinerja sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi PD untuk meningkatkan kinerjanya, maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kota Malang melaksanakan Reviu LKjIP PD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2024.

Berdasarkan hasil reviu, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh dokumen LKjIP PD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2024 telah memiliki dokumen pendukung yang memadai, meliputi dokumen Perencanaan Kinerja;
2. Sebagian besar PD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;
3. Sebagian besar PD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan dokumen perencanaan jangka pendek (Renja Perubahan Tahun 2024), jangka menengah (Renstra Tahun 2024-2026), Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dan Perwal IKU. Indikator Kinerja telah SMART, namun penetapan target pada beberapa indikator kinerja untuk dapatnya dicermati kembali agar lebih sesuai dan menunjukkan peningkatan kinerja PD.

Adapun disampaikan saran kepada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang agar menjadikan hasil rewiu LKjIP ini sebagai bahan pertimbangan guna perbaikan, peningkatan kinerja serta penguatan akuntabilitas instansi.

Demikian laporan ini disampaikan, untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.



INSPEKTOR DAERAH,

Drs. MULYONO, MSi, CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19650627 198602 1 004

**Tembusan :**

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang

# Ringkasan Eksekutif

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan refleksi dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikelola dengan baik. Pemerintah Kota Malang selaku penyelenggara pemerintahan bercita-cita mensejahterakan masyarakat serta berupaya dengan berbagai kebijakan dan program yang secara operasional bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk kinerja yang prima.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2024 masuk dalam kategori “BERHASIL”, dengan capaian rata-rata sebesar **101,51%**. Mayoritas indikator telah tercapai dengan baik, walaupun masih ada indikator yang perlu ditingkatkan. Indikator-indikator tersebut adalah Harapan Lama Sekolah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Daya Beli, Nilai SAKIP, dan Nilai Sistem Merit. Walaupun belum tercapai 100%, namun capaian seluruh indikator telah melebihi 90%. Capaian Indeks Daya Beli menggunakan data capaian tahun 2023 karena penghitungan capaian tahun 2024 belum selesai dilaksanakan, sedangkan capaian nilai Sistem Merit menggunakan data capaian tahun 2023 karena pada tahun 2024 tidak dilakukan penilaian oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

Capaian kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2024 merupakan capaian pertama dalam kurun waktu pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 merupakan pedoman perencanaan Pemerintah Kota Malang dalam waktu tertentu, setelah berakhirnya RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 hingga tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Kota Malang periode berikutnya.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun berikutnya, Pemerintah Kota Malang telah melakukan reviu prioritas pembangunan, penekanan strategi pada isu-isu strategis Kota Malang maupun target kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah selanjutnya. Tak kalah pentingnya, Pemerintah Kota Malang juga telah menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi dalam Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Kota Malang Tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja Kota Malang.



# BAB I

## PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Walikota untuk menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *clean government* yaitu pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Akan tetapi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah, maka Laporan Kinerja Pemerintah merupakan bagian dari Laporan



Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Dengan demikian, informasi laporan kinerja juga disampaikan dalam LPPD.

Kota Malang memiliki luas 111,077 kilometer persegi yang terbagi ke dalam lima kecamatan. Kecamatan paling luas adalah Kecamatan Kedungkandang yang mencapai 39,852 kilometer persegi (35,88 persen) dan paling kecil adalah Kecamatan Klojen dengan luas 8,829 kilometer persegi (7,95 persen) dari wilayah Kota Malang.

Jumlah penduduk Kota Malang pada semester 2 tahun 2024 adalah sebanyak 889.359 orang. Kepadatan penduduk Kota Malang pada semester 2 tahun 2024 adalah sebesar 8.007 orang per kilometer persegi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Malang terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
9. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan;



16. Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata;
17. Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah;
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
20. Badan Keuangan Dan Aset Daerah;
21. Badan Pendapatan Daerah;
22. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Kecamatan Klojen;
25. Kecamatan Blimbing;
26. Kecamatan Kedungkandang;
27. Kecamatan Lowokwaru;
28. Kecamatan Sukun.

Hingga bulan Januari 2025, jumlah ASN di Kota Malang adalah sejumlah 6865 orang, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

| No | Golongan Ruang | Jenis Kelamin |             | Pendidikan |            |            |            |             |            |           |
|----|----------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
|    |                | Laki-laki     | Perempuan   | SD         | SMP        | SMA        | Diploma    | S1          | S2         | S3        |
| 1  | IV/e           |               | 1           |            |            |            |            |             |            | 1         |
| 2  | IV/d           | 1             |             |            |            |            |            |             | 1          |           |
| 3  | IV/c           | 24            | 29          |            |            |            |            | 22          | 28         | 3         |
| 4  | IV/b           | 64            | 157         |            |            |            | 2          | 139         | 74         | 6         |
| 5  | IV/a           | 157           | 231         |            |            |            | 1          | 178         | 208        | 1         |
| 6  | III/d          | 243           | 465         |            |            | 3          | 70         | 500         | 134        | 1         |
| 7  | III/c          | 204           | 463         |            |            | 12         | 76         | 497         | 82         |           |
| 8  | III/b          | 327           | 722         |            |            | 51         | 122        | 835         | 41         |           |
| 9  | III/a          | 332           | 353         |            | 1          | 199        | 40         | 433         | 12         |           |
| 10 | II/d           | 237           | 147         | 1          |            | 218        | 131        | 34          |            |           |
| 11 | II/c           | 339           | 151         | 1          | 57         | 205        | 192        | 34          | 1          |           |
| 12 | II/b           | 175           | 10          |            | 45         | 123        | 5          | 12          |            |           |
| 13 | II/a           | 238           | 7           | 51         | 81         | 113        |            |             |            |           |
| 14 | I/d            | 82            | 3           | 31         | 28         | 26         |            |             |            |           |
| 15 | I/c            | 7             |             | 2          | 4          | 1          |            |             |            |           |
| 16 | PPPK/X         | 1             | 5           |            |            |            |            | 6           |            |           |
| 17 | PPPK/IX        | 546           | 1004        |            |            |            | 9          | 1541        |            |           |
| 18 | PPPK/VII       | 30            | 98          |            |            |            | 128        |             |            |           |
| 19 | PPPK/V         | 12            |             |            |            | 12         |            |             |            |           |
|    |                | <b>3019</b>   | <b>3846</b> | <b>86</b>  | <b>216</b> | <b>963</b> | <b>776</b> | <b>4231</b> | <b>581</b> | <b>12</b> |

Sumber: Data BKPSDM sampai dengan tanggal 31 Januari 2025, data diolah

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024.

Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024-2026.

Implikasi Pilkada serentak tahun 2024:

1. Sejumlah daerah otonom tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023.
2. Sejumlah daerah otonom diisi dengan Penjabat (Pj.) Gubernur/Bupati/Walikota sejak mulai tahun 2022 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak tahun 2024 (Pasal 201 ayat (3) UU nomor 10 tahun 2016).
3. Sejumlah daerah otonom tidak memiliki dokumen rencana pembangunan daerah menengah yang menjadi salah satu acuan dalam penyusunan RKPD.



Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/kota sampai dengan tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2018-2023;
4. RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional; dan
7. Regulasi yang berlaku.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2024-2026 didasarkan visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat, dan isu strategis aktual.

Tujuan dan sasaran paling sedikit mengindikasikan peningkatan dan pemeratan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 digunakan oleh Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## 1. Visi

Dengan berpijak pada nilai luhur budaya, sosial, dan agama serta berdasar pada kondisi Kota Malang saat ini, memperhitungkan tantangan dan potensi dalam 20 (dua puluh tahun) tahun mendatang, serta memperhatikan Visi RPJMN Tahun 2020-2024 yakni **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, Visi RPJPD Kota Malang Tahun 2005–2025 adalah:

**Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berbudaya, Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat yang Sejahtera**

2. Misi

Adapun Misi RPJPD Kota Malang Tahun 2005-2025 dalam mendukung capaian visi sebagai berikut:

1. Menjadikan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang berorientasi Global dengan kearifan lokal;
2. Mewujudkan SDM yang berkualitas dengan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang berbudaya;
3. Mewujudkan lingkungan kota yang kondusif sebagai kota Pendidikan yang berkualitas;
4. Mengembangkan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan tata pemerintahan dan aparatur yang professional;
6. Mewujudkan Kota Malang yang agamis, bermoral, beretika, berdap, berbudaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
7. Mewujudkan pertumbuhan Ekonomi yang Efisien, Produktif dan Berkelanjutan;
8. Mewujudkan Kota Malang yang sejahtera.

4. Tujuan dan Sasaran

Target Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Malang mengacu pada target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.



**Tabel 2.1**  
**Tujuan Dan Sasaran Strategis Kota Malang**

| TUJUAN / SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | KONDISI AWAL | TARGET 2024 (Perubahan PK 2024) | TARGET 2025 (PK 2025) | TARGET 2026 | KONDISI AKHIR |
|---|---|--------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| <b>TUJUAN 1</b>   | <b>: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing</b>                     |              |                                 |                       |             |               |
| Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter  | Rata-rata Lama Sekolah  | 10,94        | 10.96                           | 11,10                 | 11,23       | 11,23         |
|   | Harapan Lama Sekolah  | 15,77        | 15.88                           | 15,93                 | 15,99       | 15,99         |
| Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat  | Angka Harapan Hidup   | 75,32        | 75,32                           | 75,65                 | 74,57       | 74,57         |
| Meningkatnya daya saing masyarakat  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  | 67,58        | 67,58                           | 69,76                 | 65,56       | 65,56         |
| <b>TUJUAN 2</b>   | <b>: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan</b>                         |              |                                 |                       |             |               |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif  | Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif  | 4,63%        | 5-6%                            | 5-6%                  | 5-6%        | 5-6%          |
| Meningkatnya potensi pendapatan asli daerah   | Rasio PAD.  | 0,34         | 0.34                            | 0,4                   | 0,30        | 0,30          |
| Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu         | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)  | 4,51         | 4.52                            | 4,61                  | 4,69        | 4,69          |
| Meningkatnya pembangunan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)   | 59,92        | 59,92                           | 61,76                 | 57,43       | 57,43         |
| <b>TUJUAN 3</b>   | <b>: Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berasaskan keragaman</b>               |              |                                 |                       |             |               |
| Meningkatnya kualitas perlindungan sosial dan daya beli masyarakat                        | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)  | N/A          | 14.81%                          | 14,60%                | 14,43%      | 14,43%        |
|   | Indeks Daya Beli / <i>Purchasing Power Parity</i>   | 0,87         | 0.884                           | 0,898                 | 0,914       | 0,914         |
| Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan                            | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)   | 84,88        | 86.09                           | 86,24                 | 86,57       | 86,57         |
|   | Indeks pembangunan Gender (IPG)   | 95,54        | 95,67                           | 95,692                | 95,809      | 95,809        |
| <b>TUJUAN 4</b>   | <b>: Terwujudnya transformasi pelayanan publik yang tertib hukum, profesional dan akuntabel</b> |              |                                 |                       |             |               |
| Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum                                  | Persentase perda yang ditegakkan  | 100%         | 100%                            | 100%                  | 100%        | 100%          |
| Meningkatnya tata kelola  | Nilai Sakip   | 81.8         | 81.8                            | 83.41                 | 85.33       | 85.33         |



| TUJUAN / SASARAN STRATEGIS                                | INDIKATOR KINERJA  | KONDISI AWAL | TARGET 2024 (Perubahan PK 2024) | TARGET 2025 (PK 2025) | TARGET 2026 | KONDISI AKHIR |
|---|--|--------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien             | Opini BPK;   | WTP          | WTP                             | WTP                   | WTP         | WTP           |
|   | Maturitas SPIP   | 3.634        | 3.326                           | 3.326                 | 3.30        | 3.3           |
| Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN           | Nilai Sistem Merit   | 279          | 330                             | 335                   | 340         | 340           |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik | Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3.82         | 3.82                            | 4.24                  | 3.30        | 3.3           |

Sumber: Perubahan Perjanjian Kerja Kota Malang Tahun 2024.

Target yang digunakan dalam menghitung capaian kinerja Kota Malang pada tahun 2024 adalah target yang tertera dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Kota Malang. Target yang tertera dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Kota Malang telah menyesuaikan dengan capaian-capaian kinerja Kota Malang sebelumnya. Hal ini merupakan tindak lanjut terhadap reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Malang, yang menyatakan agar penetapan target pada beberapa indikator kinerja untuk dapatnya dicermati kembali agar lebih sesuai dan menunjukkan peningkatan kinerja PD.

Target kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

| TUJUAN   | SASARAN STRATEGIS                                | INDIKATOR KINERJA                      | TARGET 2024 (Perubahan PK 2024) |
|--|--|--|---------------------------------|
| Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing | Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter | Rata-rata Lama Sekolah                 | 10.96                           |
|  |  | Harapan Lama Sekolah                   | 15.88                           |
|  | Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup                    | 75,32                           |
|  | Meningkatnya daya saing masyarakat               | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja     | 67,58                           |
| Meningkatnya pertumbuhan   | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif         | Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif | 5-6%                            |



| TUJUAN   | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET 2024 (Perubahan PK 2024) |
|--|---|--|---------------------------------|
| ekonomi yang merata dan berkelanjutan  | Meningkatnya potensi pendapatan asli daerah   | Rasio PAD.   | 0.34                            |
|  | Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu         | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)             | 4.52                            |
|  | Meningkatnya pembangunan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                  | 59,92                           |
| Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berasaskan keragaman               | Meningkatnya kualitas perlindungan sosial dan daya beli masyarakat                        | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 14.81%                          |
|  |   | Indeks Daya Beli / <i>Purchasing Power Parity</i>        | 0.884                           |
|  | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan                            | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)                    | 86.09                           |
|  |   | Indeks pembangunan Gender (IPG)                          | 95.67                           |
| Terwujudnya transformasi pelayanan publik yang tertib hukum, profesional dan akuntabel | Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum                                  | Persentase perda yang ditegakkan                         | 100%                            |
|  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien                    | Nilai Sakip  | 81.8                            |
|  |   | Opini BPK;   | WTP                             |
|  |   | Maturitas SPIP   | 3.326                           |
|  | Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN   | Nilai Sistem Merit                                       | 330                             |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik                              | Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                          | 3.82   |                                 |

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Malang Tahun 2024

Target kinerja yang tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah menyesuaikan dengan kinerja yang dicapai Kota Malang sepanjang tahun 2023 untuk digunakan sebagai dasar perhitungan target tahun 2024.

#### B. Indikator Kinerja Tujuan

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2022

tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026. Terdapat 7 (tujuh) indikator Kinerja Tujuan pembangunan meliputi: (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), (3) Pertumbuhan Ekonomi, (4) Pendapatan Perkapita (ribu Rp), (5) Angka Kemiskinan, (6) Gini Rasio, dan (7) Indeks Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi disampaikan sebagai berikut:

1. Besaran target kinerja yang ditetapkan telah berdasarkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya

**Tabel 2.3**  
**Kinerja Yang Ditetapkan Telah Berdasarkan Capaian Kinerja**  
**Pada Tahun Sebelumnya**

| TUJUAN   | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | Data Awal | TARGET | REALISASI KINERJA | CAPAIAN KINERJA |
|--|---|--|-----------|--------|-------------------|-----------------|
|  |   |  | 2023      | 2024   | 2024              | 2024            |
| Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing       | Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter  | Rata-rata Lama Sekolah                                   | 10.94     | 10.96  | 11.14             | 101.64%         |
|  |   | Harapan Lama Sekolah                                     | 15.77     | 15.88  | 15.79             | 99.43%          |
|  | Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat  | Angka Harapan Hidup                                      | 75.32     | 75.32  | 75.54             | 100.29%         |
|  | Meningkatnya daya saing masyarakat  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                       | 67.58     | 67.58  | 67.52             | 99.91%          |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan           | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif  | Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif                   | 4.63%     | 5-6%   | 5.93%             | 100.00%         |
|  | Meningkatnya potensi pendapatan asli daerah   | Rasio PAD.   | 0.34      | 0.34   | 0.36              | 105.88%         |
|  | Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu         | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)             | 4.51      | 4.52   | 4.53              | 100.22%         |
|  | Meningkatnya pembangunan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                  | 59.92     | 59.92  | 61.76             | 103.07%         |
| Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berasaskan keragaman | Meningkatnya kualitas perlindungan sosial dan daya beli masyarakat                        | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | N/A       | 14.81% | 12.50%            | 115.60%         |
|  |   | Indeks Daya Beli / Purchasing Power Parity               | 0.87      | 0.884  | 0.87              | 98.42%          |



| TUJUAN   | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA                     | Data Awal | TARGET | REALISASI KINERJA | CAPAIAN KINERJA |
|--|--|---------------------------------------|-----------|--------|-------------------|-----------------|
|  |  |                                       | 2023      | 2024   | 2024              | 2024            |
|  | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan         | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) | 84.88     | 86.09  | 87.56             | 101.71%         |
|  |  | Indeks pembangunan Gender (IPG)       | 95.86     | 95.67  | 95.67             | 100.00%         |
| Terwujudnya transformasi pelayanan publik yang tertib hukum, profesional dan akuntabel | Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum               | Persentase perda yang ditegakkan      | 100%      | 100%   | 100%              | 100.00%         |
|  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien | Nilai Sakip                           | 81.80     | 81.80  | 80.08             | 97.90%          |
|  |  | Opini BPK;                            | WTP       | WTP    | WTP               | 100%            |
|  |  | Maturitas SPIP                        | 3.326     | 3.326  | 3.394             | 102.04%         |
|  | Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN                        | Nilai Sistem Merit                    | 297       | 330    | 297               | 90.00%          |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik                              | Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)       | 3.82                                  | 3.82      | 4.24   | 110.99%           |                 |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 merupakan peningkatan terhadap capaian kinerja tahun 2023.

2. Kesesuaian antara pohon kinerja dengan memperhatikan hubungan sebab akibat dan hasil identifikasi potensi *critical success factor* yang memiliki pengaruh kuat dalam mendukung kinerja strategis dan telah dilakukan reviu dan penyempurnaan dalam dokumen perencanaan.

**Tabel 2.4**  
**Identifikasi *Critical Success Factor* Dengan Program Yang Mendukung**

| No. | <i>Critical Success Factor</i> (CSF)  | Sasaran Strategis                                | Program                        | Keterangan   |
|-----|---|--|--------------------------------|--|
| 1   | Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang cerdas, adaptif, inovatif, berkarakter dan berbudaya | Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter | Program pengelolaan pendidikan | - Penyediaan biaya pendidikan gratis<br>- Menyediakan sarana prasarana pendidikan sesuai standar nasional pendidikan |

| No. | <i>Critical Success Factor (CSF)</i> | Sasaran Strategis | Program  | Keterangan  |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--|---|
|     |                                      |                   | Program pengembangan kurikulum                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- PAUD, SD dan Implementasi kurikulum merdeka</li> <li>- Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik SMP</li> <li>- Meningkatkan daya saing peserta didik baik regional, nasional dan internasional</li> </ul>   |
|     |                                      |                   | Program pendidik dan tenaga kependidikan         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerataan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>- Meningkatkan profesionalitas guru</li> <li>- Menyelenggarakan uji kompetensi guru</li> </ul>   |
|     |                                      |                   | Program pengembangan kebudayaan                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengembangan kebudayaan</li> <li>- Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan prana kebudayaan</li> <li>- Perlindungan, pengembangan pemanfaatan obyek pemajuan tradisi budaya</li> <li>- Pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan</li> <li>- Perlindungan pengembangan pemanfaatan obyek pemajuan lembaga adat</li> </ul> |
|     |                                      |                   | Program Pembinaan Sejarah                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal</li> <li>- Memberikan apresiasi pada sejarawan</li> </ul>   |
|     |                                      |                   | Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Cagar Budaya</li> <li>- Penguatan Tim Ahli Cagar Budaya</li> </ul>  |

| No. | <i>Critical Success Factor (CSF)</i> | Sasaran Strategis | Program  | Keterangan   |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--|--|
|     |                                      |                   | Program pengelolaan permuseuman                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum</li> <li>- Revitalisasi sarana dan prasarana museum</li> <li>- Membangun gerakan ayo ke museum</li> </ul>  |
|     |                                      |                   | Program pengembangan kesenian tradisional            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional</li> <li>- Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional</li> <li>- Memajukan Kesenian Tradisional</li> </ul>  |
|     |                                      |                   | Program pembinaan perpustakaan                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembudayaan gemar membaca</li> <li>- Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat</li> <li>- Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah</li> <li>- Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah Kota Malang sesuai dengan standar nasional perpustakaan</li> <li>- Pengembangan bahan pustaka</li> </ul> |
|     |                                      |                   | Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelestarian naskah kuno milik daerah</li> <li>- Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan</li> </ul>  |



| No. | Critical Success Factor (CSF)                   | Sasaran Strategis                                | Program   | Keterangan   |
|-----|---|--|---|--|
| 2   | Peningkatan kualitas taraf kesehatan masyarakat | Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan<br>- Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional serta Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga (ASMANTOGA) yang ada di Kota Malang<br>- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan<br>- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya |
|     |   |  | Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan                 | - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan<br>- Pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar  |
|     |   |  | Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman                 | - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)<br>- Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga<br>- Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga  |



| No. | <i>Critical Success Factor (CSF)</i> | Sasaran Strategis | Program   | Keterangan  |
|-----|--------------------------------------|-------------------|---|---|
|     |                                      |                   |   | yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan  |
|     |                                      |                   | Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</li> <li>- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</li> </ul> |
|     |                                      |                   | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas dan RSUD   |
|     |                                      |                   | Program pengendalian penduduk                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal</li> <li>- Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</li> <li>- Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)</li> </ul>  |



| No. | <i>Critical Success Factor (CSF)</i> | Sasaran Strategis | Program                                   | Keterangan   |
|-----|--------------------------------------|-------------------|---|--|
|     |                                      |                   | Program pembinaan keluarga berencana (KB) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Operasional dan Sarana Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</li> <li>- Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</li> <li>- Promosi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik</li> </ul> |



| No. | <i>Critical Success Factor (CSF)</i> | Sasaran Strategis | Program  | Keterangan  |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--|---|
|     |                                      |                   | Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</li> <li>- Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)</li> <li>- Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</li> <li>- Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</li> <li>- Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)</li> <li>- Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)</li> </ul> |
|     |                                      |                   | Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga</li> <li>- Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan</li> <li>- Seleksi Atlet Daerah</li> <li>- Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan</li> <li>- Pengembangan Organisasi Keolahragaan</li> </ul>  |



| No. | Critical Success Factor (CSF)   | Sasaran Strategis                  | Program  | Keterangan  |
|-----|---|------------------------------------|--|---|
|     |   |                                    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi</li> <li>- Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat</li> </ul>   |
| 3   | Peningkatan kompetensi tenaga kerja, kesempatan kerja dan lapangan berusaha | Meningkatnya daya saing masyarakat | Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</li> <li>- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</li> </ul>   |
|     |   |                                    | Program penempatan tenaga kerja                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penempatan Tenaga Kerja Melalui Layanan AKAD ( Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)</li> <li>- Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja</li> <li>- Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan</li> </ul> |
|     |   |                                    | Program hubungan industrial                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan</li> <li>- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Kota Malang</li> </ul>                 |



| No. | Critical Success Factor (CSF)  | Sasaran Strategis                        | Program  | Keterangan   |
|-----|--|--|--|--|
|     |  |  | Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan   | - pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, kepeloporan pemuda dan Wirausaha Muda Pemula<br>- Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula<br>-Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan<br>- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan |
|     |  |  | Program pengembangan kapasitas kepramukaan   | - Pembinaan kewirausahaan kepramukaan  |
| 4   | Peningkatan potensi daya saing daerah melalui penguatan ekonomi kreatif menghadapi krisis global | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif | Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif                                    | - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif<br>- Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif  |
|     |  |  | Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual | - Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual<br>- Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif  |
|     |  |  | Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata  | - Pengembangan Destinasi Pariwisata<br>- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata<br>- Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata<br>- Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah  |



| No. | Critical Success Factor (CSF) | Sasaran Strategis | Program  | Keterangan   |
|-----|-------------------------------|-------------------|--|--|
|     |                               |                   |  | Rendah   |
|     |                               |                   | Program pemasaran pariwisata                   | - Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri<br>- Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata  |
|     |                               |                   | Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi    | - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi<br>- Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi   |
|     |                               |                   | Program pendidikan dan latihan perkoperasian   | - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi<br>- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi    |
|     |                               |                   | Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi | - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha |
|     |                               |                   | Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi   | - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi   |
|     |                               |                   | Program pengembangan UMKM                      | - Pelatihan bagi pelaku UMKM<br>- Dukungan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi                     |

| No. | <i>Critical Success Factor (CSF)</i> | Sasaran Strategis | Program  | Keterangan  |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--|---|
|     |                                      |                   | Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro</li> <li>- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro</li> <li>- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</li> <li>- Penyusunan Basis Data Usaha Mikro</li> <li>- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan</li> </ul> |
|     |                                      |                   | Program perencanaan dan pembangunan industri                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri</li> <li>- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</li> </ul>   |
|     |                                      |                   | Program pengelolaan sistem informasi industri nasional                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</li> </ul>  |
|     |                                      |                   | Program pengendalian izin usaha industri                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Izin Usaha Industri yang terbit melalui OSS</li> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri</li> </ul>   |



| No. | <i>Critical Success Factor (CSF)</i> | Sasaran Strategis | Program  | Keterangan   |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--|--|
|     |                                      |                   | Program peningkatan sarana distribusi perdagangan    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>- Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</li> </ul>  |
|     |                                      |                   | Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</li> <li>- fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri bagi UMKM</li> </ul>   |
|     |                                      |                   | Program perizinan dan pendaftaran perusahaan         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang</li> <li>- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik</li> <li>- Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya</li> <li>- Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C</li> </ul> |
|     |                                      |                   | Program Pengembangan Ekspor                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan</li> <li>- pelatihan/fasilitasi pengembangan ekspor bagi pelaku usaha</li> </ul>  |



| No. | Critical Success Factor (CSF)   | Sasaran Strategis   | Program   | Keterangan  |
|-----|---|---|---|---|
| 5   | Kemandirian fiskal melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah   | Meningkatnya potensi pendapatan asli daerah                                       | Program pengelolaan pendapatan daerah                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Gebyar Sadar Pajak, Sumbang Kelurahan, Singgah Perumahan, Relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi PBB, Gathering Wajib Pajak</li> <li>- Pemasangan e-tax di restoran, Hotel, tempat hiburan dan tempat parkir</li> <li>- Melakukan operasi gabungan dengan Satpol PP</li> <li>- Pendataan secara intensif pada jenis pajak daerah lainnya serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi secara berkelanjutan</li> </ul> |
|     |   |   | Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi dan pembinaan pengetahuan para juru parkir dalam proses administrasi dan pendataan titik parkir</li> <li>- Penyiapan lahan parkir</li> <li>- Optimalisasi infrastruktur E-Parkir</li> </ul>  |
| 6   | Pembangunan dan penataan ruang serta infrastrukturnya kota yang mendukung dan memfasilitasi aktivitas pengembangan kota secara efektif, efisien dan berkelanjutan | Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu | Program penyelenggaraan jalan                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Jalan</li> <li>- Pemeliharaan Rutin Berkala Jalan</li> <li>- Pembangunan Jembatan</li> <li>- Pemeliharaan Rutin Berkala Jembatan</li> <li>- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</li> </ul>  |



| No. | <i>Critical Success Factor (CSF)</i> | Sasaran Strategis | Program   | Keterangan   |
|-----|--------------------------------------|-------------------|---|--|
|     |                                      |                   | Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan</li> <li>- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan</li> <li>- Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan</li> <li>- Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan</li> <li>- Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan</li> </ul>                        |
|     |                                      |                   | Program pengelolaan sumber daya air (SDA)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Embung dan Penampung Air</li> <li>- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan</li> </ul>  |
|     |                                      |                   | Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</li> <li>- Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</li> </ul>  |
|     |                                      |                   | Program pengembangan perumahan                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana</li> <li>- Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</li> <li>- Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan</li> <li>- Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</li> </ul> |
|     |                                      |                   | Program kawasan permukiman                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</li> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh</li> <li>- Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh</li> </ul>  |



| No. | <i>Critical Success Factor (CSF)</i> | Sasaran Strategis | Program                                     | Keterangan  |
|-----|--------------------------------------|-------------------|---|---|
|     |                                      |                   | Program penataan bangunan gedung            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah</li> <li>- Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</li> </ul> |
|     |                                      |                   | Program pengembangan jasa konstruksi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis</li> <li>- Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi</li> <li>- Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi</li> </ul>  |
|     |                                      |                   | Program penataan bangunan dan lingkungannya | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis</li> <li>- Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah</li> </ul>  |



| No. | <i>Critical Success Factor (CSF)</i> | Sasaran Strategis | Program  | Keterangan   |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--|--|
|     |                                      |                   | Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</li> <li>- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</li> <li>- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</li> <li>- Penyediaan Air Minum bagi masyarakat</li> </ul>  |
|     |                                      |                   | Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)</li> <li>- Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat</li> <li>- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman</li> <li>- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat</li> <li>- Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja</li> <li>- Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</li> </ul> |



| No. | <i>Critical Success Factor (CSF)</i> | Sasaran Strategis | Program   | Keterangan  |
|-----|--------------------------------------|-------------------|---|---|
|     |                                      |                   | Program penyelenggaraan penataan ruang                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)</li> <li>- publikasi informasi penataan ruang</li> <li>- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang</li> </ul>   |
|     |                                      |                   | Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan evaluasi dan perencanaan jaringan trayek</li> <li>- Merencanakan dan melaksanakan penyediaan angkutan umum massal</li> <li>- Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor bagi kendaraan wajib uji</li> <li>- Meningkatkan pelayanan terminal penumpang umum</li> <li>- Evaluasi penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas</li> <li>- melaksanakan perawatan, penggantian dan pengadaan median jalan, marka, rambu lalu lintas, lampu isyarat lalu lintas (traficlight)</li> <li>- Melaksanakan penambahan titik-titik penerapan ATCS (Automatic Traffic Control System)</li> </ul> |
|     |                                      |                   | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</li> </ul>  |



| No. | Critical Success Factor (CSF)  | Sasaran Strategis  | Program   | Keterangan   |
|-----|--|--|---|--|
| 7   | Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | Meningkatnya pembangunan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim | Program perencanaan lingkungan hidup  | - Pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)<br>- Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)<br>- Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)  |
|     |  |  | Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) | - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<br>- Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH<br>- Pengawasan langsung / tidak langsung terhadap usaha / kegiatan di bidang lingkungan hidup |
|     |  |  | Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup   | - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup<br>- Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup<br>- Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat<br>- Pendampingan penilaian Proklamasi Lestari<br>- Pengujian kualitas lingkungan hidup  |
|     |  |  | Program   | - Pendampingan Gerakan   |



| No. | <i>Critical Success Factor (CSF)</i> | Sasaran Strategis | Program  | Keterangan  |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--|---|
|     |                                      |                   | peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat | Peduli Lingkungan Hidup<br>- Pendampingan ke sekolah - sekolah Adiwiyata dan Pondok Pesantren (Program Eco Pesantren)<br>- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat   |
|     |                                      |                   | Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat                              | - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah<br>- Penyelenggaraan lomba Kampung Bersinar   |
|     |                                      |                   | Program penanganan pengaduan lingkungan hidup                                      | - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)  |
|     |                                      |                   | Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)                                 | - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati<br>- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)   |
|     |                                      |                   | Program pengelolaan persampahan  | - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan<br>- Penanganan sampah melalui pengangkutan, pengumpulan sampah, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST |



| No. | Critical Success Factor (CSF)                                | Sasaran Strategis  | Program  | Keterangan   |
|-----|--|--|--|--|
|     |  |  | Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</li> <li>- Sosialisasi terkait limbah B3 kepada Usaha dan/atau kegiatan</li> </ul>   |
|     |  |  | Program penanggulangan bencana   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan Satgas Kebencanaan di kewilayahan dan TRC Lintas Sektor</li> <li>- Penyusunan Kajian Risiko Bencana</li> <li>- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana</li> <li>- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana</li> <li>- Respon Cepat Darurat Bencana</li> <li>- Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana</li> </ul> |
| 8   | Kualitas perlindungan sosial yang berpihak masyarakat rentan | Meningkatnya kualitas perlindungan sosial dan daya beli masyarakat | <p>Program perlindungan dan jaminan sosial</p> <p>Program penanganan bencana</p>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</li> <li>- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</li> <li>- Pengelolaan Data Fakir Miskin</li> <li>- Penyediaan Makanan dan Sandang korban bencana</li> <li>- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi</li> <li>- Pelayanan Dukungan Psikososial</li> <li>- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</li> </ul>  |

| No. | <i>Critical Success Factor (CSF)</i> | Sasaran Strategis | Program                                  | Keterangan  |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--|---|
|     |                                      |                   | Program pemberdayaan sosial              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat</li> <li>- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat</li> <li>- Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</li> </ul>   |
|     |                                      |                   | Program rehabilitasi sosial              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</li> <li>- Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</li> </ul> |
|     |                                      |                   | Program pengelolaan taman makam pahlawan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional</li> <li>- Pelestarian nilai -nilai kepahlawanan, keprintisandan kesetiakawanan sosial</li> </ul>   |
|     |                                      |                   | Program perlindungan khusus anak         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha</li> <li>- Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</li> </ul>   |



| No. | Critical Success Factor (CSF)  | Sasaran Strategis | Program   | Keterangan   |
|-----|--|-------------------|---|--|
|     |  |                   | Program Pemenuhan Hak Anak  | - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat<br>- Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak |
|     |  |                   | Program perlindungan perempuan                                      | - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan<br>- Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan   |
| 9   | Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat dengan menjaga daya beli masyarakat sebagai penanganan dampak inflasi |                   | Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus<br>- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan                             |
|     |  |                   | Program standardisasi dan perlindungan konsumen                     | - Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang<br>- Pengawasan/ Penyuluhan bagi Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina   |
|     |  |                   | Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat   | - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya<br>- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal   |



| No. | Critical Success Factor (CSF) | Sasaran Strategis | Program   | Keterangan   |
|-----|-------------------------------|-------------------|---|--|
|     |                               |                   | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian                    | - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian<br>- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi<br>- Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak |
|     |                               |                   | Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian                 | - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian  |
|     |                               |                   | Program penyuluhan pertanian  | - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani<br>- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian  |
|     |                               |                   | Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis<br>- Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan   |
|     |                               |                   | Program pengelolaan perikanan budidaya                                  | - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan<br>- Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan<br>- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya  |
|     |                               |                   | Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan                        | - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Keci   |



| No. | <i>Critical Success Factor (CSF)</i>                                   | Sasaran Strategis  | Program   | Keterangan  |
|-----|--|--|---|---|
| 10  | Kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan | Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)</li> <li>- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)</li> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender</li> </ul>  |
|     |  |  | Program peningkatan kualitas keluarga                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga</li> <li>- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak</li> </ul>  |
|     |  |  | Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</li> <li>- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</li> <li>- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</li> </ul> |



| No. | <i>Critical Success Factor (CSF)</i> | Sasaran Strategis | Program  | Keterangan   |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--|--|
|     |                                      |                   | Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan Kebakaran</li> <li>- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran</li> <li>- Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</li> <li>- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran</li> <li>- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</li> <li>- Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</li> </ul> |
|     |                                      |                   | Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</li> <li>- Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka</li> </ul>   |
|     |                                      |                   | Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya                                   | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah   |
|     |                                      |                   | Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta  |



| No. | Critical Success Factor (CSF) | Sasaran Strategis | Program  | Keterangan   |
|-----|-------------------------------|-------------------|--|--|
|     |                               |                   |  | Penanganan Konflik di Daerah   |
|     |                               |                   | Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | Pelaksanaan koordinasi Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah  |
|     |                               |                   | Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan  | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daera   |
|     |                               |                   | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan   | - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan<br>- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing |
|     |                               |                   | Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum   | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  |
|     |                               |                   | Program penyelenggaraan urusan pemerintahan  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |



| No. | Critical Success Factor (CSF)   | Sasaran Strategis  | Program  | Keterangan   |
|-----|---|--|--|--|
|     |   |  | umum   |  |
| 11  | Optimalisasi penegakan Peraturan Daerah (Perda)                         | Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum               | Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum | - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah<br>- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                                   |
|     |   |  | Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat        | - Penyusunan Produk Hukum Daerah<br>- Bantuan Hukum<br>- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum   |
| 12  | Percepatan reformasi tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien | Program pelayanan penanaman modal                    | - Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik<br>- Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko           |
|     |   |  | Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal     | - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya<br>- Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha<br>- Pengawasan Penanaman Modal |
|     |   |  | Program promosi penanaman modal                      | - Pelaksanaan Strategi dan tata kelola Promosi Penanaman Moda  |
|     |   |  | Program pengelolaan arsip                            | - Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis Daerah<br>- Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah  |
|     |   |  | Program pendaftaran penduduk                         | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam Database Kependudukan   |

| No. | <i>Critical Success Factor (CSF)</i> | Sasaran Strategis | Program  | Keterangan  |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--|---|
|     |                                      |                   | Program Pencatatan Sipil   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting</li> <li>- Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil</li> </ul>   |
|     |                                      |                   | Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah</li> <li>- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</li> </ul> |
|     |                                      |                   | Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</li> <li>- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</li> <li>- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</li> </ul>                      |
|     |                                      |                   | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan</li> <li>- Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</li> <li>- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</li> <li>- Pengembangan Inovasi dan Teknologi</li> </ul>            |



| No. | Critical Success Factor (CSF) | Sasaran Strategis | Program                                       | Keterangan  |
|-----|-------------------------------|-------------------|---|---|
|     |                               |                   | Program pengelolaan keuangan daerah           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</li> <li>- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</li> <li>- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</li> <li>- Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</li> </ul>               |
|     |                               |                   | Program pengelolaan barang milik daerah       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan</li> <li>- Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> </ul>  |
|     |                               |                   | Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bantuan Bea Siswa utk warga miskin jenjang SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi</li> <li>- Bantuan untuk Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Modin Qori, Muazin , Guru Hafidz Quran (Huffadz)</li> <li>- Administrasi Tata Pemerintahan</li> <li>- Kerja Sama Daerah</li> <li>- Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</li> </ul> |
|     |                               |                   | Program perekonomian dan pembangunan          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</li> <li>- Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</li> <li>- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>- Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</li> </ul>  |



| No. | <i>Critical Success Factor (CSF)</i> | Sasaran Strategis | Program   | Keterangan   |
|-----|--------------------------------------|-------------------|---|--|
|     |                                      |                   | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</li> <li>- Pemeliharaan Barang Milik Daerah</li> <li>- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> <li>- Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>- Pengadaan Barang Milik Daerah</li> </ul> |
|     |                                      |                   | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik   | penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan   |
|     |                                      |                   | Program penyelenggaraan pengawasan                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reviu Laporan Keuangan</li> <li>- Kerjasama Pengawasan Internal</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</li> <li>- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</li> </ul>   |
|     |                                      |                   | Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</li> <li>- Pendampingan dan Asistensi</li> </ul>  |



| No. | Critical Success Factor (CSF)   | Sasaran Strategis   | Program   | Keterangan   |
|-----|---|---|---|--|
|     |   |   | Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</li> <li>- Pembahasan Kebijakan Anggaran</li> <li>- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</li> <li>- Peningkatan Kapasitas DPRD</li> <li>- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</li> <li>- Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</li> <li>- Fasilitasi Tugas DPRD</li> </ul> |
| 13  | Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kinerja ASN   | Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN           | Program kepegawaian daerah                                    | - Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi, promosi, pengembangan kompetensi, penilaian dan evaluasi kinerja ASN   |
|     |   |   | Program pengembangan sumber daya manusia                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Kompetensi Teknis</li> <li>- Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</li> </ul>  |
|     |   |   | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota   | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan   |
| 14  | Membangun efisiensi birokrasi melalui digitalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik | Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</li> </ul>   |



| No. | Critical Success Factor (CSF) | Sasaran Strategis | Program   | Keterangan   |
|-----|-------------------------------|-------------------|---|--|
|     |                               |                   | Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</li> <li>- Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li> <li>- Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan</li> </ul>                     |
|     |                               |                   | Program pengelolaan profil kependudukan                       | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan  |
|     |                               |                   | Program pengelolaan aplikasi informatika                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</li> <li>- Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah</li> </ul>   |
|     |                               |                   | Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah</li> <li>- Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah</li> </ul>  |
|     |                               |                   | Program penyelenggaraan statistik sektoral                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</li> <li>- Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</li> <li>- Membangun Metadata Statistik Sektoral</li> <li>- Pengembangan Infrastruktur</li> </ul> |

| No. | Critical Success Factor (CSF) | Sasaran Strategis | Program   | Keterangan  |
|-----|-------------------------------|-------------------|---|---|
|     |                               |                   | Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik | - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik<br>- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik<br>- Pengelolaan Media Komunikasi Publik<br>- Pelayanan Informasi Publik<br>- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas |

*Critical Success Factor (CSF)* Kota Malang tahun 2024 telah diselesaikan melalui Sasaran Strategis Kota Malang, melalui Program yang sesuai dan dijabarkan dalam aktivitas-aktivitas yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis.

3. Penyusunan pohon kinerja dan *cascading* telah sesuai dengan isu strategis dan telah tergambar hubungan kinerja antar lintas perangkat daerah maupun dengan *stakeholder*.

Tabel 2.5  
*Cascading* Isu Strategis Dengan Lintas Perangkat Daerah Dan *Stakeholder*

| No. | Critical Success Factor (CSF)   | Program                                  | Stakeholder (Perangkat Daerah Lain / Instansi Vertikal / Masyarakat)  |
|-----|---|--|---|
| 1   | Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang cerdas, adaptif, inovatif, berkarakter dan berbudaya | Program pengelolaan pendidikan           | Satuan pendidikan, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, BBPMP Provinsi Jawa Timur, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
|     |   | Program pengembangan kurikulum           | Satuan pendidikan, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah BBPMP Provinsi Jawa Timur, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  |
|     |   | Program pendidik dan tenaga kependidikan | Satuan pendidikan, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah BBPMP Provinsi Jawa Timur, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  |
|     |   | Program pengembangan kebudayaan          | Budayawan, satuan pendidikan  |

| No. | Critical Success Factor (CSF)                   | Program   | Stakeholder (Perangkat Daerah Lain / Instansi Vertikal / Masyarakat)   |
|-----|---|---|--|
|     |   | Program Pembinaan Sejarah   | Sejarawan, satuan pendidikan   |
|     |   | Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya                            | Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah 11 Mojokerto  |
|     |   | Program pengelolaan permuseuman   | Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah 11 Mojokerto  |
|     |   | Program pengembangan kesenian tradisional                                   | Seniman, Dewan Kesenian Malang, pegiat seni, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, satuan pendidikan  |
|     |   | Program pembinaan perpustakaan  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kelurahan, lembaga binaan, penerbit   |
|     |   | Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno                        | Budayawan, kolektor, vilolog   |
| 2   | Peningkatan kualitas taraf kesehatan masyarakat | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, masyarakat, Rumah sakit, Puskesmas, laboratorium kesehatan   |
|     |   | Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan                 | Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan   |
|     |   | Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman                 | Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Apotek, BPOM, UMKM   |
|     |   | Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan                            | Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, masyarakat   |
|     |   | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota                 | Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD  |
|     |   | Program pengendalian penduduk   | Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, masyarakat, Dinas Kesehatan, organisasi kemasyarakatan, Petugas lapangan Penyuluh KB (PLKB) |

| No. | Critical Success Factor (CSF)   | Program  | Stakeholder (Perangkat Daerah Lain / Instansi Vertikal / Masyarakat)   |
|-----|---|--|--|
|     |   | Program pembinaan keluarga berencana (KB)                    | Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, masyarakat, Dinas Kesehatan, organisasi kemasyarakatan, Petugas lapangan Penyuluh KB (PLKB)                                     |
|     |   | Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) | Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, masyarakat, Dinas Kesehatan, organisasi kemasyarakatan, Petugas lapangan Penyuluh KB (PLKB)                                     |
|     |   | Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan       | Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, komunitas olahraga tradisional, Komunitas Lari Malang Raya, Komite Paralimpiade Nasional Indonesia, KONI    |
| 3   | Peningkatan kompetensi tenaga kerja, kesempatan kerja dan lapangan berusaha | Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja       | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan<br>Lembaga Pelatihan Kerja   |
|     |   | Program penempatan tenaga kerja                              | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan<br>Lembaga Pelatihan Kerja<br>PHRI<br>Perusahaan Swasta<br>KADIN   |
|     |   | Program hubungan industrial                                  | Kementrian Ketenagakerjaan<br>Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan<br>Bagian Hukum Setda Kota Malang<br>Lembaga Kerjasama Tripartit<br>PHRI<br>Perusahaan Swasta<br>KADIN |
|     |   | Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan         | Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dispendukcapil, Dinsos P3AP2KB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, organisasi kepemudaan  |
|     |   | Program pengembangan kapasitas kepramukaan                   | Organisasi kepramukaan   |

| No. | Critical Success Factor (CSF)  | Program  | Stakeholder (Perangkat Daerah Lain / Instansi Vertikal / Masyarakat)   |
|-----|--|--|--|
| 4   | Peningkatan potensi daya saing daerah melalui penguatan ekonomi kreatif menghadapi krisis global | Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif                                    | Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif<br>Dinas Komunikasi dan Informatika<br>Dinas Koperasi, Perindustrian dan Koperasi<br>Komunitas Pelaku Ekonomi kreatif  |
|     |  | Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual | Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif<br>Badan Nasional Sertifikasi Profesi<br>Dinas Koperasi, Perindustrian dan Koperasi<br>Komunitas Pelaku Ekonomi kreatif  |
|     |  | Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata  | Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif<br>Dinas Komunikasi dan Informatika<br>Dinas Koperasi, Perindustrian dan Koperasi<br>Komunitas Pelaku Ekonomi kreatif<br>Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru         |
|     |  | Program pemasaran pariwisata   | Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perhubungan, Kominfo, Satpol PP, pokdarwis, Komite Ekonomi Kreatif, Diskopindag, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia, PHRI |
|     |  | Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi  | Dewan Koperasi Indonesia<br>Kementerian Koperasi   |
|     |  | Program pendidikan dan latihan perkoperasian   | Kementrian Koperasi<br>Dewan Koperasi Indonesia  |
|     |  | Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi   | Kementrian Koperasi<br>Dewan Koperasi Indonesia  |
|     |  | Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi   | Kementrian Koperasi<br>Dewan Koperasi Indonesia  |



| No. | Critical Success Factor (CSF) | Program  | Stakeholder (Perangkat Daerah Lain / Instansi Vertikal / Masyarakat)   |
|-----|-------------------------------|--|--|
|     |                               | Program pengembangan UMKM  | Kementrian Koperasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelaku Usaha UMKM                                  |
|     |                               | Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) | Kementrian Koperasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelaku Usaha UMKM                                  |
|     |                               | Program perencanaan dan pembangunan industri                             | Kementrian Koperasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelaku Usaha Industri                              |
|     |                               | Program pengelolaan sistem informasi industri nasional                   | Kementrian Koperasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelaku Usaha Industri                              |
|     |                               | Program pengendalian izin usaha industri                                 | Kementrian Koperasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelaku Usaha Industri                              |
|     |                               | Program peningkatan sarana distribusi perdagangan                        | Kementrian Koperasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Komunikasi dan Informatika Pelaku Usaha UMKM |
|     |                               | Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri                     | Kementrian Koperasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Komunikasi dan Informatika Pelaku Usaha UMKM |
|     |                               | Program perizinan dan pendaftaran perusahaan                             | Kementrian Koperasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Komunikasi dan Informatika Pelaku Usaha UMKM |



| No. | Critical Success Factor (CSF)   | Program   | Stakeholder (Perangkat Daerah Lain / Instansi Vertikal / Masyarakat)  |
|-----|---|---|---|
|     |   | Program Pengembangan Ekspor                                   | Kementrian Koperasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Komunikasi dan Informatika Pelaku Usaha UMKM                                |
| 5   | Kemandirian fiskal melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah   | Program pengelolaan pendapatan daerah                         | BKAD, Kanwil DJP, Kominfo, PD pemungut retribusi, BUMD, Bank Jatim, Kejaksaan, Satpol PP, PHRI, Perusahaan Swasta, Pengembang Perumahan, KADIN                              |
|     |   | Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | masyarakat, OPD terkait, akademisi, Polri, TNI, Kecamatan, Kelurahan, masyarakat, juru parkir, pengusaha angkutan umum  |
| 6   | Pembangunan dan penataan ruang serta infrastruktur kota yang mendukung dan mewadahi aktivitas pengembangan kota secara efektif, efisien dan berkelanjutan | Program penyelenggaraan jalan                                 | Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah KemenPUPR, UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur  |
|     |   | Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase          | Kecamatan, Kelurahan, BBWS Brantas KemenPUPR  |
|     |   | Program pengelolaan sumber daya air (SDA)                     | Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, Ditjen SDA KemenPUPR, Dispangtan, Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), BBWS Brantas Kemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jasa Tirta |
|     |   | Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) | Kecamatan, Kelurahan, Real Estate Indonesia (REI), pengembang perumahan, masyarakat perumahan   |
|     |   | Program pengembangan perumahan                                | Kecamatan, Kelurahan, Real Estate Indonesia (REI), pengembang perumahan, masyarakat perumahan   |
|     |   | Program kawasan permukiman                                    | Kecamatan, Kelurahan, Dinsos P3AP2KB  |
|     |   | Program penataan bangunan gedung                              | PD pengguna BMD yang memerlukan pembangunan / rehab bangunan gedung, Pelaku usaha bangunan gedung   |



| No. | Critical Success Factor (CSF)  | Program   | Stakeholder (Perangkat Daerah Lain / Instansi Vertikal / Masyarakat)                           |
|-----|--|---|--|
|     |  | Program pengembangan jasa konstruksi  | Masyarakat Jasa Konstruksi   |
|     |  | Program penataan bangunan dan lingkungannya   | Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), masyarakat Ikatan Ahli Perencanaan                               |
|     |  | Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum  | PDAM Tugu Tirta, Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPAM), Kecamatan, Kelurahan, masyarakat |
|     |  | Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah  | Dinkes, Kecamatan, Kelurahan, Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah KemenPUPR, masyarakat       |
|     |  | Program penyelenggaraan penataan ruang  | Kementerian ATR / Badan Pertanahan Nasional, Kecamatan, Kelurahan, masyarakat                  |
|     |  | Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)   | - Pemilik angkutan umum<br>- Supir angkot<br>- TNI/POLRI<br>- Masyarakat                       |
|     |  | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan  | BAPPEDA, DINKES, DINSOS P3AP2KB, DISPANGTAN  |
| 7   | Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | Program perencanaan lingkungan hidup  | Akademisi, DPUPR/PPK, Dishub, Dinkes, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Masyarakat         |
|     |  | Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) | Disnaker PMPTSP, Dinkes, akademisi, usaha / kegiatan, masyarakat, Satpol PP                    |
|     |  | Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup   | Dishub, Tim Pembina Proklam, perguruan tinggi, Kelurahan                                       |
|     |  | Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat                              | Lembaga pendidikan dan pondok pesantren (Eco Pesantren)  |



| No. | Critical Success Factor (CSF)                                | Program  | Stakeholder (Perangkat Daerah Lain / Instansi Vertikal / Masyarakat)   |
|-----|--|--|--|
|     |  | Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat  | RW, kelurahan, masyarakat  |
|     |  | Program penanganan pengaduan lingkungan hidup  | Diskominfo, masyarakat   |
|     |  | Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)   | DPUPRPKP, Dishub, BKAD, CSR, PLN, PDAM, Telkom, BPN  |
|     |  | Program pengelolaan persampahan  | Masyarakat, PDAM, lembaga pendidikan, Kementerian, Dinas LH Kabupaten / Kota di luar Kota Malang   |
|     |  | Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) | Pihak pengelolaan limbah B3 lanjutan   |
|     |  | Program penanggulangan bencana   | - Badan Nasional Penanggulangan Bencana<br>- TNI/POLRI<br>- Badan Penanggulangan Bencana Jawa Timur<br>- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika<br>- Balai Besar Wilayah Sungai<br>- Palang Merah Indonesia<br>- Perguruan Tinggi<br>- Komunitas Relawan<br>- Kelurahan Tangguh |
| 8   | Kualitas perlindungan sosial yang berpihak masyarakat rentan | Program perlindungan dan jaminan sosial  | Kementerian Sosial, Bappeda, masyarakat, Dinas Provinsi, lembaga pelatihan   |
|     |  | Program penanganan bencana   | Kementerian Sosial, Bappeda, masyarakat, Dinas Provinsi, lembaga pelatihan   |
|     |  | Program pemberdayaan sosial  | Kementerian Sosial, Bappeda, masyarakat, Dinas Provinsi, lembaga pelatihan   |
|     |  | Program rehabilitasi sosial  | Kementerian Sosial, Bappeda, masyarakat, Dinas Provinsi, lembaga pelatihan   |
|     |  | Program pengelolaan taman makam pahlawan   | Kementerian Sosial, Bappeda, masyarakat, Dinas Provinsi, lembaga pelatihan   |



| No. | Critical Success Factor (CSF)  | Program   | Stakeholder (Perangkat Daerah Lain / Instansi Vertikal / Masyarakat)  |
|-----|--|---|---|
|     |  | Program perlindungan khusus anak  | Kementerian PPA, Polres, Kelurahan, Rumah Sakit, masyarakat   |
|     |  | Program Pemenuhan Hak Anak  | Kementerian PPA, Polres, Kelurahan, Rumah Sakit, masyarakat   |
|     |  | Program perlindungan perempuan  | Kementerian PPA, Polres, Kelurahan, Rumah Sakit, masyarakat   |
| 9   | Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat dengan menjaga daya beli masyarakat sebagai penanganan dampak inflasi | Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting     | Dispangtan  |
|     |  | Program standardisasi dan perlindungan konsumen                         | UPT Metrologi Legal   |
|     |  | Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat       | Diskopindag, Dinsos, Bappeda, BPS, Dinkes, Bagian PISDA, Perumda Tugu Aneka Usaha, Bulog, masyarakat, pelaku usaha pertanian, perikanan, dan peternakan |
|     |  | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian                    | Kodim, Polresta, Masyarakat (Poktan)  |
|     |  | Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian                 | Polresta, Kodim, Kejaksaan, Bagian PISDA, DLH, Dinkes, Pupuk Indonesia, Diskopindag, distributor pupuk, Poktan  |
|     |  | Program penyuluhan pertanian  | Masyarakat (Poktan)   |
|     |  | Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Disnaker PMPTSP, PDHI, Universitas Brawijaya, Perumda Tugu Aneka Usaha, masyarakat  |
|     |  | Program pengelolaan perikanan budidaya                                  | Disnaker PMPTSP, BPS, masyarakat, Pokdakan, UPR,  |
|     |  | Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan                        | Dinkes, Pokdakan, masyarakat  |

| No. | Critical Success Factor (CSF)  | Program  | Stakeholder (Perangkat Daerah Lain / Instansi Vertikal / Masyarakat)  |
|-----|--|--|---|
| 10  | Kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat | Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan  | Lembaga pemberdayaan perempuan, masyarakat  |
|     |  | Program peningkatan kualitas keluarga  | Lembaga pemberdayaan perempuan, masyarakat  |
|     |  | Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum   | - TNI/POLRI<br>- Kecamatan<br>- Kelurahan<br>- Satlinmas  |
|     |  | Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran  | - TNI/POLRI<br>- Dinas Kesehatan<br>- DINSOS P3AP2KB<br>- Kecamatan<br>- Kelurahan<br>- Satlinmas   |
|     |  | Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan   | - Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)<br>- TNI/POLRI<br>- BNN<br>- KNPI<br>- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)  |
|     |  | Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya   | - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)<br>- Kementrian Agama<br>- Kejaksaan Negeri<br>- TNI/POLRI<br>- BNN  |
|     |  | Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial                             | - Forkopinda ( Walikota, DPRD, POLRESTA, KODIM, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, TNI AU, TNI AL)<br>- Forkopimcam( Kecamatan, KORAMIL, dan POLSEK)<br>- Imigrasi<br>- unsur Intelijen<br>- unsur masyarakat |
|     |  | Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | - KPU<br>- BAWASLU<br>- POLRESTA<br>- KODIM<br>- Partai Politik   |

| No. | Critical Success Factor (CSF)   | Program   | Stakeholder (Perangkat Daerah Lain / Instansi Vertikal / Masyarakat)  |
|-----|---|---|---|
|     |   | Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan | -POLRESTA<br>- KODIM<br>- Kejaksaan Negeri<br>- BIN<br>- Organisasi Masyarakat  |
|     |   | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan            | - Lembaga Kemasyarakatan<br>- Pokmas dan Ormas  |
|     |   | Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum           | - Forkopimcam( Kecamatan, KORAMIL, dan POLSEK)  |
|     |   | Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum              | - Forkopimcam( Kecamatan, KORAMIL, dan POLSEK)  |
| 11  | Optimalisasi penegakan Peraturan Daerah (Perda)                         | Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum          | TNI, POLRI, PD terkait, Satlinmas, BKPM, Kecamatan, Kelurahan   |
|     |   | Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat                 | Kementrian Hukum dan HAM<br>Lembaga Bantuan Hukum   |
| 12  | Percepatan reformasi tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja | Program pelayanan penanaman modal                             | Diskopindag, Dishub, Disdikbud, Satpol PP, Bagian Hukum, Kecamatan  |
|     |   | Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal              | Diskopindag, Dishub, Disdikbud, Satpol PP, Bagian Hukum, Kecamatan  |
|     |   | Program promosi penanaman modal                               | Diskopindag, Dishub, Disdikbud, Satpol PP, Bagian Hukum, Kecamatan  |
|     |   | Program pengelolaan arsip                                     | Seluruh PD  |
|     |   | Program pendaftaran penduduk                                  | Kemendagri, Sekretariat Daerah, BKAD, Inspektorat, Bappeda, BKPSDM, Kominfo, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, lembaga masyarakat (lansia, disabilitas, dll), bidan se-Kota Malang |
|     |   | Program Pencatatan Sipil                                      |   |

| No. | Critical Success Factor (CSF) | Program  | Stakeholder (Perangkat Daerah Lain / Instansi Vertikal / Masyarakat)   |
|-----|-------------------------------|--|--|
|     |                               | Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh PD</li> <li>- Bappeda Provinsi Jawa Timur</li> <li>- DPRD</li> <li>- Unsur Tematik (anak, perempuan, lansia, disabilitas)</li> <li>- Dunia usaha</li> <li>- Akademisi</li> <li>- Organisasi non pemerintah</li> <li>- Media masa</li> <li>- Masyarakat</li> </ul> |
|     |                               | Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah | Seluruh PD   |
|     |                               | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh PD</li> <li>- BRIN Provinsi Jawa Timur</li> <li>- Perguruan Tinggi</li> </ul>   |
|     |                               | Program pengelolaan keuangan daerah                                | Bappeda, Inspektorat   |
|     |                               | Program pengelolaan barang milik daerah                            | BPN Kota Malang, Kejaksaan Negeri  |
|     |                               | Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perguruan tinggi</li> <li>- Organisasi Masyarakat</li> <li>- Masyarakat</li> </ul>  |
|     |                               | Program perekonomian dan pembangunan                               | Seluruh PD, BUMD   |
|     |                               | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota        | Seluruh PD   |
|     |                               | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik          | Bappeda, BKAD, Bag. Pemerintahan, Bag. PBJ, Inspektorat Daerah, BKPSDM, Diskominfo   |
|     |                               | Program penyelenggaraan pengawasan                                 | BPK, BPKP, APH, Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lain, Kemendagri, AIPI, seluruh PD, masyarakat, instansi terkait  |



| No. | Critical Success Factor (CSF)   | Program   | Stakeholder (Perangkat Daerah Lain / Instansi Vertikal / Masyarakat)   |
|-----|---|---|--|
|     |   | Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi       | BPK, BPKP, APH, Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lain, Kemendagri, AIPI, seluruh PD, masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, instansi/lembaga terkait lainnya             |
|     |   | Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD            | Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan  |
| 13  | Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kinerja ASN   | Program kepegawaian daerah                                    | Masyarakat, BKN, Kemenpan RB, ASN, instansi pembina, Bappenas, universitas, BPSDM Provinsi Jawa Timur  |
|     |   | Program pengembangan sumber daya manusia                      | LAN, BPSDM Jatim, BPSDM Kemendagri, universitas, BKN, Kemenpan RB, Kemendagri, Kemenkeu, Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur, Inspektorat  |
|     |   | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota   | Kementrian PANRB, Kemendagri, Seluruh PD   |
| 14  | Membangun efisiensi birokrasi melalui digitalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal | Diskopindag, Dishub, Disdikbud, Satpol PP, Bagian Hukum, Kecamatan   |
|     |   | Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan       | Kemendagri, Sekretariat Daerah, BKAD, Inspektorat, Bappeda, BKPSDM, Kominfo, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, lembaga masyarakat (lansia, disabilitas, dll), bidang se-Kota Malang |
|     |   | Program pengelolaan profil kependudukan                       | PD lain, Kejaksaan Negeri, BUMD, MCC, masyarakat, komunitas startup Malang, PMI, relawan, PLN, Telkom, Polresta, ruang publik, RW se-Kota Malang                                       |
|     |   | Program pengelolaan aplikasi informatika                      | PD lain, Kejaksaan Negeri, BUMD, MCC, masyarakat, komunitas startup Malang, PMI, relawan, PLN, Telkom, Polresta, ruang publik, RW se-Kota Malang                                       |
|     |   | Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi | Seluruh PD, Badan Siber dan Sandi Negara   |

| No. | Critical Success Factor (CSF) | Program   | Stakeholder (Perangkat Daerah Lain / Instansi Vertikal / Masyarakat)         |
|-----|-------------------------------|---|--|
|     |                               | Program penyelenggaraan statistik sektoral          | BPS, Seluruh PD  |
|     |                               | Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik | Seluruh PD, RRI, TVRI, KIM, PWRI, Radio dan Siaran TV swasta, Media Digital, |

Penyelesaian isu strategis telah dilaksanakan melalui program yang sesuai dan telah melibatkan Perangkat Daerah lain dan *stakeholder* yang terlibat.

4. Formulasi perhitungan dan sumber data dari setiap Indikator Kinerja Utama yang dimiliki berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6  
Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama Kota Malang  
Tahun 2024-2026

| Kinerja Utama Tujuan/Sasaran                                       | Indikator Kinerja Utama            | Formulasi Perhitungan/Penjelasan   | Sumber Data           |
|--|------------------------------------|--|-----------------------|
| Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)   | $IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)]$ Dimana :<br>X(1) = Indeks Harapan Hidup<br>X(2) = Indeks Pendidikan<br>X(3) = Indeks Standar hidup layak  | Badan Pusat Statistik |
|  | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | $TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan:<br>TPT: Tingkat pengangguran terbuka (%) PP: Jumlah pengangguran (orang) PAK: Jumlah angkatan kerja (orang)  | Badan Pusat Statistik |
| Meningkatnya Masyarakat Terdidik dan Berkarakter                   | Rata-rata lama sekolah             | Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 | Badan Pusat Statistik |

| Kinerja Utama Tujuan/Sasaran                     | Indikator Kinerja Utama  | Formulasi Perhitungan/Penjelasan   | Sumber Data           |
|--|--------------------------|--|-----------------------|
|  |                          | <p>tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak</p> $MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (LamaSekolahPendudukke - i)$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. P15+ = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas</li> <li>2. Lama sekolah penduduk ke-i: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tidak pernah sekolah = 0</li> <li>&gt; Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1</li> <li>&gt; Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir +1</li> <li>&gt; Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir</li> <li>&gt; Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1</li> </ul> </li> <li>3. Tahun konversi ijazah <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tidak punya ijazah = 0</li> <li>&gt; SD = 6 tahun; SMP = 9 tahun; SMA = 12 tahun</li> <li>&gt; D1/D2 = 14 tahun; D3 = 15 tahun; D4 = 16 tahun; S1 = 17 tahun</li> <li>&gt; S2 = 19 tahun; S3 = 22 tahun</li> </ul> </li> </ol> |                       |
|  | Harapan Lama Sekolah     | <p>Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang</p> $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>--<br/>Keterangan :</p> <p><math>HLS_a^t</math> = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun</p> <p><math>E_i^t</math> = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p><math>P_i^t</math> = Jumlah penduduk usia i pada tahun t</p> <p>i = Usia (a, a+1, ..., n)</p> <p>FK = Faktor koreksi pesantren</p>  | Badan Pusat Statistik |
| Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat | Angka Usia Harapan Hidup | Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok individu di suatu wilayah  | Badan Pusat Statistik |

| Kinerja Utama Tujuan/Sasaran  | Indikator Kinerja Utama                      | Formulasi Perhitungan/Penjelasan  | Sumber Data  |
|---|--|---|--|
| Meningkatnya Daya Saing Masyarakat  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja           | Jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali seratus persen   | Badan Pusat Statistik  |
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan                            | Pertumbuhan Ekonomi                          | $\frac{PDRB(n) - PDRB(n-1)}{PDRB(n-1)} \times 100\%$ <p> <i>PDRB (n) = nilai PDRB tahun n</i><br/> <i>PDRB (n - 1) = nilai PDRB tahun n - 1</i> </p>    | Badan Pusat Statistik  |
|   | Pendapatan per kapita (ribu Rp)              | $\frac{PDRB}{Jumlah\ Penduduk}$   | Badan Pusat Statistik  |
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif  | Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif       | $\frac{PDRB\ Ekraf(n) - PDRB\ Ekraf(n-1)}{PDRB\ Ekraf(n-1)} \times 100\%$   | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                              |
| Meningkatnya Potensi Pendapatan Asli Daerah   | Rasio PAD                                    | Jumlah Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah Pendapatan Daerah  | Badan Pendapatan Daerah  |
| Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota Secara Terpadu         | IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur) | $IKLI = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$                                | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| Meningkatnya Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)      | $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$   | Dinas Lingkungan Hidup   |
| Terwujudnya Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang Berasaskan                            | Angka Kemiskinan                             | <p>Persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK)</p> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^g \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ | Badan Pusat Statistik  |



| Kinerja Utama Tujuan/Sasaran   | Indikator Kinerja Utama                                  | Formulasi Perhitungan/Penjelasan  | Sumber Data   |
|--|--|---|---|
| Keberagaman  |  | Dimana :<br>$\alpha = 0$<br>$z =$ garis kemiskinan.<br>$y_i =$ Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ( $i=1, 2, 3, \dots, q$ ), $y_i < z$<br>$q =$ Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.<br>$n =$ jumlah penduduk. |   |
|  | Gini Rasio   | $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$<br>Dimana :<br>$P_i$ : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke- $i$<br>$Q_i$ : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke- $i$  | Badan Pusat Statistik   |
| Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial dan Daya Beli Masyarakat                     | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | $\frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$  | Dinas Sosial, P3AP2KB   |
|  | Indeks Daya Beli/<br><i>Purchasing Power Parity</i>      | $PPP_j = \prod_{i=1}^m \left( \frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{1/m}$<br>$P_{ij} =$ harga komoditas $i$ dikota $j$<br>$P_{ik} =$ harga komoditas $i$ di Jakarta Selatan<br>$m =$ jumlah komoditas  | Badan Pusat Statistik   |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan                         | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)                    | <i>Nilai rata - rata terbagi unsur total nilai persepsi per item</i><br>$= \frac{\text{Penimbang Total item yang terisi}}{\text{Total item}} \times \text{Nilai}$<br>Indikator penyusun IPMas: Indeks Gotong Royong, Indeks Toleransi dan Indeks Rasa Aman.                             | Kecamatan   |
|  | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                          | IPG = IPM perempuan/IPM laki-laki   | Badan Pusat Statistik   |
| Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel | Indeks Reformasi Birokrasi (RB)                          | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB  | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |



| Kinerja Utama Tujuan/Sasaran   | Indikator Kinerja Utama  | Formulasi Perhitungan/Penjelasan  | Sumber Data   |
|--|--|---|---|
| Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum               | Persentase Perda yang Ditegakkan                                 | Jumlah Perda yang mengandung sanksi yang ditegakkan dibagi dengan jumlah Perda yang mengandung sanksi dikali seratus persen   | Satpol PP   |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Efisien | Nilai SAKIP  | Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian PANRB   | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
|  | Opini BPK  | Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah  | BPK RI  |
|  | Maturitas SPIP   | Hasil evaluasi SPIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)   | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan                         |
| Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN                        | Nilai Sistem Merit   | a. aspek perencanaan kebutuhan;<br>b. aspek Pengadaan;<br>c. aspek Pengembangan Karir;<br>d. aspek Promosi dan Mutasi;<br>e. aspek Manajemen Kinerja;<br>f. aspek Penggajian;<br>g. aspek Perlindungan dan Pelayanan;<br>dan<br>h. aspek Sistem Informasi | Komisi Aparatur Sipil Negara                                      |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik              | Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Laporan Hasil Evaluasi Kematangan SPBE oleh Kementerian PANRB   | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |

Formulasi perhitungan dan sumber data Indikator Kinerja Utama Kota Malang telah sesuai dengan kondisi nyata di Kota Malang.

### C. Perjanjian Kinerja

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



Tabel 2.7

## Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2024

| TUJUAN   | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET 2024 | ANGGARAN          |
|--|---|--|-------------|-------------------|
| Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing                     | Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter  | Rata-rata Lama Sekolah                                   | 10,96       | 245.673.735.092   |
|  |   | Harapan Lama Sekolah                                     | 15,88       |                   |
|  | Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat  | Angka Harapan Hidup                                      | 75,32       | 342.616.329.392   |
|  | Meningkatnya daya saing masyarakat  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                       | 67,58       | 6.420.980.728     |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan                         | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif  | Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif                   | 5-6%        | 44.508.632.523    |
|  | Meningkatnya potensi pendapatan asli daerah   | Rasio PAD.   | 0,34        | 26.694.191.458    |
|  | Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu         | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)             | 4,52        | 319.094.923.266   |
|  | Meningkatnya pembangunan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                  | 59,92       | 49.220.603.038    |
| Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berasaskan keragaman               | Meningkatnya kualitas perlindungan sosial dan daya beli masyarakat                        | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 14,81%      | 40.638.815.970    |
|  |   | Indeks Daya Beli / <i>Purchasing Power Parity</i>        | 0,884       |                   |
|  | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan                            | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)                    | 86,09       | 182.331.323.990   |
| Indeks pembangunan Gender (IPG)  |   | 95,670   |             |                   |
| Terwujudnya transformasi pelayanan publik yang tertib hukum, profesional dan akuntabel | Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum                                  | Persentase perda yang ditegakkan                         | 100%        | 6.037.710.092     |
|  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien                    | Nilai Sakip  | 81,80       | 1.317.656.855.835 |
|  |   | Opini BPK;   | WTP         |                   |
| Maturitas SPIP   | 3,33  |  |             |                   |



| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET 2024 | ANGGARAN                 |
|--------|---|--|-------------|--------------------------|
|        | Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN           | Nilai Sistem Merit   | 330         | 9.169.541.599            |
|        | Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik | Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3,82        | 30.635.170.866           |
|        |   |  | JUMLAH      | <b>2.620.698.813.849</b> |

Target kinerja yang digunakan sebagai acuan untuk menghitung capaian kinerja tahun 2024 adalah target yang tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target tersebut telah menyesuaikan dengan kinerja yang dicapai Kota Malang sepanjang tahun 2023 untuk digunakan sebagai dasar perhitungan target tahun 2024.

#### D. Standar Penilaian Kinerja

Terdapat tiga aspek keberhasilan/kegagalan kinerja yang digunakan sebagai cara pengukuran, yaitu capaian kinerja, anggaran, dan sumber daya, yang mana parameter penentuan tingkat keberhasilan/keberhasilannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

| No. | SKOR    | LEVEL CAPAIAN KINERJA |
|-----|---------|-----------------------|
| 1   | < 60%   | Tidak Berhasil        |
| 2   | 60-90%  | Cukup Berhasil        |
| 3   | 90-110% | Berhasil              |
| 4   | > 110%  | Sangat Berhasil       |



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Pengukuran dilakukan terhadap capaian tahun 2024, terhadap capaian tahun sebelumnya, dan terhadap target jangka menengah. Secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2024 dinyatakan “Berhasil”, karena rata-rata capaiannya **101,51%** dari target. Keberhasilan tersebut merupakan upaya Kota Malang untuk berinovasi dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Mayoritas indikator telah tercapai dengan baik, walaupun masih ada indikator yang perlu ditingkatkan. Indikator-indikator tersebut adalah Harapan Lama Sekolah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), Indeks Daya Beli, Nilai SAKIP, dan Nilai Sistem Merit. Walaupun belum tercapai 100%, namun capaian seluruh indikator telah melebihi 90%. Diperlukan analisa mendalam terkait capaian pertumbuhan ekonomi kreatif karena besarnya tantangan yang dihadapi oleh pegiat ekonomi kreatif, baik dalam hal peningkatan pengelolaan usaha maupun banyaknya produk luar negeri sejenis yang masuk. Capaian Indeks Daya Beli menggunakan data capaian tahun 2023 karena penghitungan capaian tahun 2024 belum selesai dilaksanakan, sedangkan capaian nilai Sistem Merit menggunakan data capaian tahun 2023 karena pada tahun 2024 tidak dilakukan penilaian oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

#### 1. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 3.1**

**Pengukuran Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

| TUJUAN  | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|--|--|--------|-----------|---------|
|   |  |  | 2024   | 2024      | 2024    |
| Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing                    | Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter   | Rata-rata lama sekolah                                   | 10.96  | 11.14     | 101.64% |
|   |  | Harapan lama sekolah                                     | 15.88  | 15.79     | 99.43%  |
|   | Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat   | Angka harapan hidup                                      | 75.32  | 75.54     | 100.29% |
|   | Meningkatnya daya saing masyarakat   | Tingkat partisipasi angkatan kerja                       | 67.58  | 67.52     | 99.91%  |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan                        | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif   | Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif                   | 5-6%   | 5.93%     | 100.00% |
|   | Meningkatnya potensi pendapatan asli daerah  | Rasio PAD.   | 0.34   | 0.36      | 105.88% |
|   | Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu          | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)             | 4.52   | 4.53      | 100.22% |
|   | Meningkatnya pembangunan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                  | 59.92  | 61.76     | 103.07% |
| Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berasaskan keberagaman            | Meningkatnya kualitas perlindungan sosial dan daya beli masyarakat                         | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 14.81% | 12.50%    | 115.60% |
|   |  | Indeks Daya Beli / Purchasing Power Parity               | 0.884  | 0.87*)    | 98.42%  |
|   | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan                             | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)                    | 86.09  | 87.56     | 101.71% |
|   |  | Indeks pembangunan Gender (IPG)                          | 95.67  | 95.67 *)  | 100.00% |
| Terwujudnya transformasi pelayanan publi yang tertib hukum, profesional dan akuntabel | Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum                                   | Persentase perda yang ditegakkan                         | 100%   | 100%      | 100.00% |
|   | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien                     | Nilai Sakip  | 81.80  | 80.08     | 97.90%  |
|   |  | Opini BPK;   | WTP    | WTP       | 100%    |
|   |  | Maturitas SPIP   | 3.33   | 3.394     | 102.04% |
| Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN                                       | Nilai Sistem Merit   | 330  | 297 *) | 90.00%    |         |



| TUJUAN | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|--------|---|--|--------|-----------|---------|
|        |   |  | 2024   | 2024      | 2024    |
|        | Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik | Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3.82   | 4.24      | 110.99% |

\*) Data realisasi tahun 2023, Data 2024 belum rilis dari BPS.

Capaian kinerja sasaran strategis sebagian besar sudah mencapai target, bahkan ada yang melebihi target. Akan tetapi masih ada kinerja yang belum berhasil mencapai target, yaitu Harapan Lama Sekolah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Daya Beli, Nilai SAKIP, dan Nilai Sistem Merit. Indeks Daya Beli dan Nilai Sistem Merit menggunakan data realisasi tahun 2023. Penilaian Indeks Daya Beli menggunakan data tahun 2023 karena penilaian tahun 2024 belum selesai dilaksanakan, sedangkan Nilai Sistem Merit menggunakan data tahun 2023 karena pada tahun 2024 KASN tidak melakukan penilaian Sistem Merit. Nilai SAKIP tahun 2024 belum memenuhi target karena berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, komponen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja mengalami penurunan nilai. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, telah disusun rencana tindak untuk meningkatkan nilai SAKIP Kota Malang berdasarkan rekomendasi dari Kementerian PANRB.

## **2. Pengukuran realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.**

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 dan baseline tahun 2023 diperlukan untuk mengetahui peningkatan kinerja yang ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**

**Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya**

| TUJUAN   | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | Data Awal | TARGET |      |      | REALISASI KINERJA |      |      | CAPAIAN KINERJA |      |      |
|--|---|--|-----------|--------|------|------|-------------------|------|------|-----------------|------|------|
|  |   |  | 2023      | 2024   | 2025 | 2026 | 2024              | 2025 | 2026 | 2024            | 2025 | 2026 |
| Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing | Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter  | Rata-rata Lama Sekolah                                   | 10.94     | 10.96  |      |      | 11.14             |      |      | 101.64%         |      |      |
|  |   | Harapan Lama Sekolah                                     | 15.77     | 15.88  |      |      | 15.79             |      |      | 99.43%          |      |      |
|  | Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat  | Angka Harapan Hidup                                      | 75.32     | 75.32  |      |      | 75.54             |      |      | 100.29%         |      |      |
|  | Meningkatnya daya saing masyarakat  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                       | 67.58     | 67.58  |      |      | 67.52             |      |      | 99.91%          |      |      |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan     | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif  | Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif                   | 4.63%     | 5-6%   |      |      | 5.93%             |      |      | 100.00%         |      |      |
|  | Meningkatnya potensi pendapatan asli daerah   | Rasio PAD.   | 0.34      | 0.34   |      |      | 0.36              |      |      | 105.88%         |      |      |
|  | Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu         | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)             | 4.51      | 4.52   |      |      | 4.53              |      |      | 100.22%         |      |      |
|  | Meningkatnya pembangunan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                  | 59.92     | 59.92  |      |      | 61.76             |      |      | 103.07%         |      |      |
| Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang                | Meningkatnya kualitas perlindungan sosial dan daya beli masyarakat                        | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | N/A       | 14.81% |      |      | 12.50%            |      |      | 115.60%         |      |      |



| TUJUAN   | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA                                 | Data Awal | TARGET |      |      | REALISASI KINERJA |      |         | CAPAIAN KINERJA |      |      |
|--|--|---|-----------|--------|------|------|-------------------|------|---------|-----------------|------|------|
|  |  |   | 2023      | 2024   | 2025 | 2026 | 2024              | 2025 | 2026    | 2024            | 2025 | 2026 |
| berasaskan keragaman   |  | Indeks Daya Beli / <i>Purchasing Power Parity</i> | 0.87      | 0.884  |      |      | 0.87 *)           |      |         | 98.42%          |      |      |
|  | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan         | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)             | 84.88     | 86.09  |      |      | 87.56             |      |         | 101.71%         |      |      |
|  |  | Indeks pembangunan Gender (IPG)                   | 95.86     | 95.670 |      |      | 95.67*)           |      |         | 100.00%         |      |      |
| Terwujudnya transformasi pelayanan publik yang tertib hukum, profesional dan akuntabel | Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum               | Persentase perda yang ditegakkan                  | 100%      | 100%   |      |      | 100%              |      |         | 100.00%         |      |      |
|  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien | Nilai Sakip                                       | 81.80     | 81.80  |      |      | 80.08             |      |         | 97.90%          |      |      |
|  |  | Opini BPK;  | WTP       | WTP    |      |      | WTP               |      |         | 100%            |      |      |
|  |  | Maturitas SPIP                                    | 3.326     | 3.33   |      |      | 3.394             |      |         | 102.04%         |      |      |
|  | Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN                        | Nilai Sistem Merit                                | 297       | 330    |      |      | 297 *)            |      |         | 90.00%          |      |      |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik                              | Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)       | 3.82  | 3.82      |        |      | 4.24 |                   |      | 110.99% |                 |      |      |

\*) Data realisasi tahun 2023, Data 2024 belum rilis dari BPS.



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar capaian target kinerja tahun 2024 telah meningkat dibandingkan capaian tahun 2023. Pada tahun 2024, indikator yang capaiannya lebih rendah dari capaian tahun 2023 adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (capaian tahun 2023 adalah 67,58, sedangkan capaian tahun 2024 adalah 67,52) dan nilai SAKIP (capaian tahun 2023 adalah 81,80, sedangkan capaian tahun 2024 adalah 80,08). Capaian indikator Indeks Daya Beli dan Indeks Pembangunan Gender menggunakan capaian tahun 2023 karena belum rilis dari BPS. Sedangkan capaian Sistem Merit menggunakan capaian tahun 2023 karena pada tahun 2024 tidak dilakukan penghitungan.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Analisis berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA                            | TARGET JANGKA MENENGAH | REALISASI KINERJA | CAPAIAN KINERJA |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------|
|   |  | 2026                   | 2024              | 2024            |
| Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter                                  | Rata-rata Lama Sekolah                       | 11.23                  | 11.14             | 99.20%          |
|   | Harapan Lama Sekolah                         | 15.99                  | 15.79             | 98.75%          |
| Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat                                  | Angka Harapan Hidup                          | 74.57                  | 75.54             | 101.30%         |
| Meningkatnya daya saing masyarakat  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja           | 65.56                  | 67.52             | 102.99%         |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif  | Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif       | 5-6%                   | 5.93%             | 100.00%         |
| Meningkatnya potensi pendapatan asli daerah                                       | Rasio PAD.                                   | 0.30                   | 0.36              | 120.00%         |
| Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) | 4.69                   | 4.53              | 96.59%          |

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET JANGKA MENENGAH | REALISASI KINERJA | CAPAIAN KINERJA |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------|
|   |  | 2026                   | 2024              | 2024            |
| Meningkatnya pembangunan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                          | 57.43                  | 61.76             | 103.07%         |
| Meningkatnya kualitas perlindungan sosial dan daya beli masyarakat                        | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)         | 14.43%                 | 12.50%            | 113.37%         |
|   | Indeks Daya Beli / <i>Purchasing Power Parity</i>                | 0.914                  | 0.87 *)           | 95.19%          |
| Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan                            | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)                            | 86.57                  | 87.56             | 101.14%         |
|   | Indeks pembangunan Gender (IPG)                                  | 95.809                 | 95.67*)           | 99.85%          |
| Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum                                  | Persentase perda yang ditegakkan                                 | 100%                   | 100%              | 100.00%         |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien                    | Nilai Sakip  | 85.33                  | 80.08             | 93.85%          |
|   | Opini BPK;   | WTP                    | WTP               | 100%            |
|   | Maturitas SPIP   | 3.30                   | 3.394             | 102.85%         |
| Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN   | Nilai Sistem Merit   | 340                    | 297 *)            | 87.35%          |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik                                 | Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3.30                   | 4.24              | 128.48%         |

\*) Data realisasi tahun 2023, Data 2024 belum rilis dari BPS.

Indikator yang telah tercapai dan yang telah melebihi target jangka menengah tahun 2026 adalah Angka Harapan Hidup, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif, Rasio PAD, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Pembangunan Masyarakat, Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Opini BPK, Maturitas SPIP, dan Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal tersebut akan ditindaklanjuti dalam perencanaan periode selanjutnya.

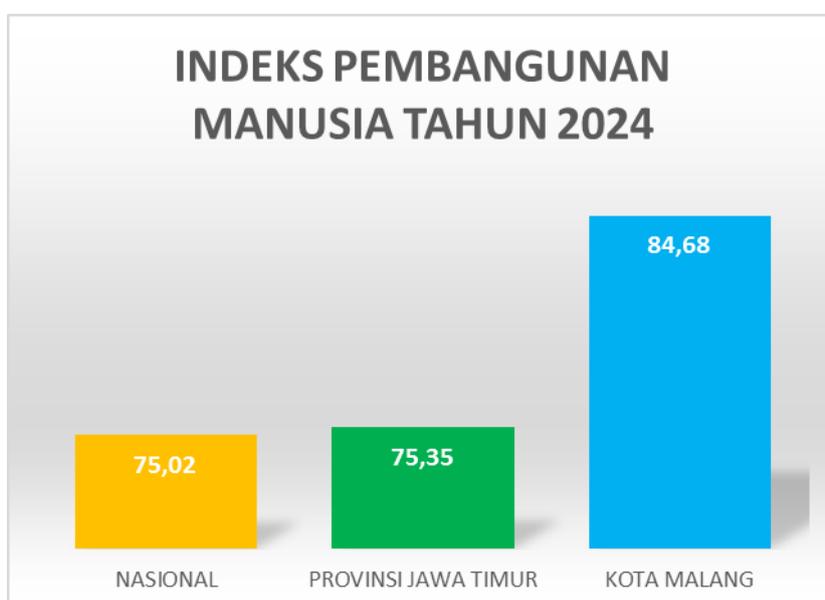
#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Realisasi Kinerja Di Level Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

Untuk menggambarkan profil kinerja Pemerintah Kota Malang, perlu dibandingkan/benchmark kinerja dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana gambar di bawah ini.

**Tabel 3.4**  
**Benchmark Kinerja**

| TUJUAN   | INDIKATOR KINERJA UTAMA                  | MALANG 2024 | JATIM 2024 | NASIONAL 2024 |
|--|--|-------------|------------|---------------|
| Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing                     | INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA               | 84.68       | 75.35      | 75.02         |
|  | TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA             | 6.10%       | 4.19%      | 4.91%         |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan                         | PERTUMBUHAN EKONOMI                      | 5,41%       | 4.93%      | 5.03%         |
|  | PENDAPATAN PERKAPITA (dalam ribu rupiah) | 107,540     | 75,770     | 78,600        |
| Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berasaskan keberagaman             | ANGKA KEMISKINAN                         | 3.91%       | 9.79%      | 9.03%         |
|  | GINI RASIO                               | 0.420       | 0.730      | 0.380         |
| Terwujudnya transformasi pelayanan publik yang tertib hukum, profesional dan akuntabel | INDEKS REFORMASI BIROKRASI               | 88.30       | 94.14      | 76.81 *)      |

\*) Data realisasi tahun 2023, Data 2024 belum rilis Kemenpan RI.



Pada tahun 2024, capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang lebih tinggi daripada capaian Nasional maupun capaian Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 84,68.

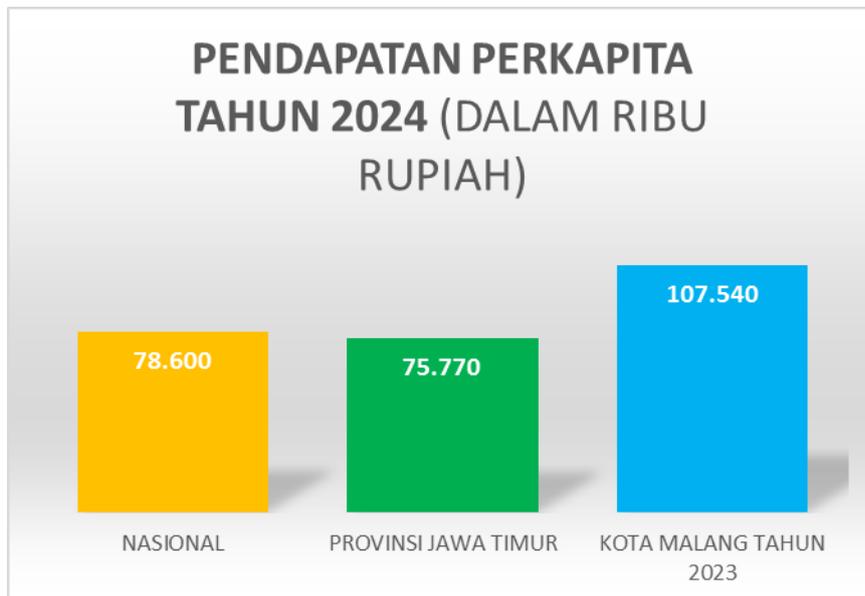


Pada tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Malang lebih tinggi daripada capaian Nasional maupun Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 6,10%. Hal ini akan ditindaklanjuti dalam perencanaan periode selanjutnya.

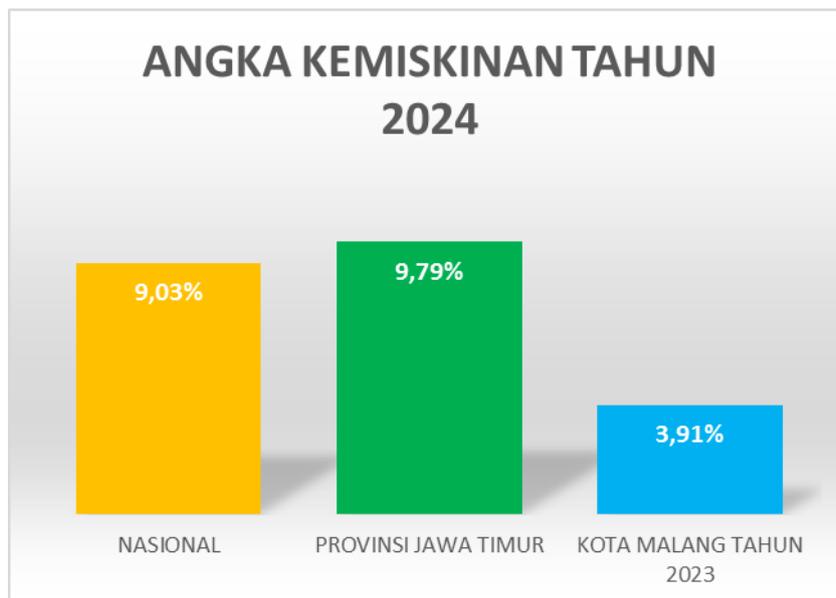


Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang pada tahun 2024 telah melebihi capaian Nasional maupun Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, yaitu sebesar 5,41%.





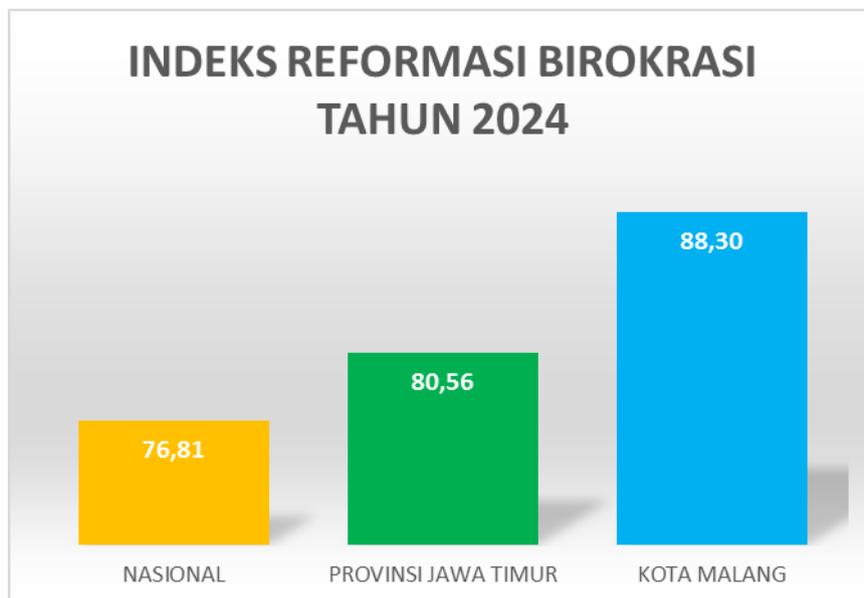
Capaian Pendapatan Perkapita Kota Malang Tahun 2023 (dalam ribu rupiah) telah melebihi capaian Nasional maupun Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, yaitu sebesar Rp 107.540.000,00. Angka ini dijadikan acuan capaian tahun 2024 karena capaian Pendapatan Perkapita Kota Malang Tahun 2024 belum selesai dihitung.



Capaian Angka Kemiskinan Kota Malang Tahun 2023 lebih rendah daripada capaian Nasional maupun Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, yaitu sebesar 3,91%. Angka ini dijadikan acuan capaian tahun 2024 karena capaian Angka Kemiskinan Kota Malang Tahun 2024 belum selesai dihitung.



Capaian Gini Rasio Kota Malang Tahun 2023 melebihi capaian Nasional maupun Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, yaitu sebesar 0,410. Angka ini dijadikan acuan capaian tahun 2024 karena capaian Gini Rasio Kota Malang Tahun 2024 belum selesai dihitung.



Capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Malang pada tahun 2024 adalah 88,30, namun lebih rendah daripada capaian Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 94,14. Hal ini akan ditindaklanjuti dalam perencanaan periode selanjutnya. Sedangkan capaian Nasional masih menggunakan capaian tahun 2023, yaitu sebesar 77,89. Hal ini disebabkan pada saat penyusunan dokumen ini, masih dalam masa sanggah, sehingga capaian Nasional masih belum ditetapkan.

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Kegagalan

Dari pengukuran di atas dapat dilihat bahwa capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2024 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan perencanaan di tahun berikutnya.

**Tabel 3.5**  
**Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja**

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | CAPAIAN KINERJA | PREDIKAT KEBERHASILAN / KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA |                        |                             |                    |
|---|--|-----------------|---|------------------------|-----------------------------|--------------------|
|   |  |                 | 110 ke atas SANGAT BERHASIL                       | 90 =< s/d 110 BERHASIL | 60 =< S/D 90 CUKUP BERHASIL | <60 TIDAK BERHASIL |
| Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter  | Rata-rata Lama Sekolah                                   | 101.64%         |   | V                      |                             |                    |
|   | Harapan Lama Sekolah                                     | 99.43%          |   | V                      |                             |                    |
| Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat  | Angka Harapan Hidup                                      | 100.29%         |   | V                      |                             |                    |
| Meningkatnya daya saing masyarakat  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                       | 99.91%          |   | V                      |                             |                    |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif  | Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif                   | 100.00%         |   | V                      |                             |                    |
| Meningkatnya potensi pendapatan asli daerah   | Rasio PAD.   | 105.88%         |   | V                      |                             |                    |
| Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu         | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)             | 100.22%         |   | V                      |                             |                    |
| Meningkatnya pembangunan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                  | 103.07%         |   | V                      |                             |                    |
| Meningkatnya kualitas perlindungan sosial dan daya beli masyarakat                        | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 115.60%         | V   |                        |                             |                    |
|   | Indeks Daya Beli / <i>Purchasing Power Parity</i>        | 98.42%          |   | V                      |                             |                    |
| Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan                            | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)                    | 101.71%         |   | V                      |                             |                    |
|   | Indeks pembangunan Gender (IPG)                          | 100.00%         |   |                        |                             |                    |

| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | CAPAIAN KINERJA | PREDIKAT KEBERHASILAN / KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA |                        |                             |                    |
|--|--|-----------------|---|------------------------|-----------------------------|--------------------|
|  |  |                 | 110 ke atas SANGAT BERHASIL                       | 90 =< s/d 110 BERHASIL | 60 =< S/D 90 CUKUP BERHASIL | <60 TIDAK BERHASIL |
| Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum               | Persentase perda yang ditegakkan                                 | 100.00%         |   | V                      |                             |                    |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien | Nilai Sakip  | 97.90%          |   | V                      |                             |                    |
|  | Opini BPK;   | 100%            |   | V                      |                             |                    |
|  | Maturitas SPIP   | 102.04%         |   | V                      |                             |                    |
| Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN                        | Nilai Sistem Merit   | 90.00%          |   | V                      |                             |                    |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik              | Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 110.99%         | V   |                        |                             |                    |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh Indikator Utama Kota Malang telah tercapai dengan kategori “Berhasil” dan “Sangat Berhasil”. Hal ini akan ditindaklanjuti dalam perencanaan periode selanjutnya.

Adapun analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian Indikator Kinerja Utama Kota Malang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis 1: Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter**, dengan indikator:

a. **Rata-rata lama sekolah**

Definisi: Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja, indikator Rata-rata Lama Sekolah berada dalam kategori BERHASIL, dengan nilai



11,14 dibandingkan target tahun 2024 sebesar 10,96, di mana capaiannya adalah sebesar 101,64%.

Capaian Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan upaya Pemerintah Kota Malang antara lain melalui penyediaan biaya pendidikan gratis; menyediakan sarana prasarana pendidikan sesuai standar nasional pendidikan; melakukan pengembangan kebudayaan; pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan; pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal; perlindungan cagar budaya; penguatan Tim Ahli Cagar Budaya; revitalisasi sarana dan prasarana museum; membangun gerakan Ayo Ke Museum; memajukan kesenian tradisional; pembudayaan gemar membaca; pembinaan perpustakaan umum dan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah Kota Malang; pelestarian naskah kuno milik daerah; pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

#### **b. Harapan Lama Sekolah**

Definisi: lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja, indikator Harapan Lama Sekolah berada dalam kategori BERHASIL, walaupun capaiannya masih belum 100% memenuhi target. Adapun nilai Harapan Lama Sekolah yang diperoleh tahun 2024 adalah sebesar 15,79 dari target sebesar 15,88, di mana capaiannya adalah 99,43%. Namun demikian, capaian 2024 ini meningkat dari capaian tahun 2023, yaitu 15,77.

Capaian Harapan Lama Sekolah menunjukkan upaya Pemerintah Kota Malang antara lain melalui implementasi Kurikulum Merdeka; penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik PAUD, SD dan SMP; meningkatkan daya saing peserta didik baik regional, nasional dan internasional; pemerataan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan; meningkatkan profesionalitas guru; menyelenggarakan uji kompetensi guru.

2. **Sasaran strategis 2: Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat**, dengan indikator **Angka Harapan Hidup**. Angka Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok individu di suatu wilayah.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja, indikator Angka Harapan Hidup berada dalam kategori BERHASIL, dengan nilai 75,54 dibandingkan target tahun 2024 sebesar 74,10, dimana capaiannya adalah sebesar 101,94%.

Capaian Angka Harapan Hidup tahun 2024 yang melebihi target ini menunjukkan upaya Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional serta Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga (ASMANTOGA); pengelolaan sistem informasi kesehatan; pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar; pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT; penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan



menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat; peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas dan RSUD; pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB; pengelolaan ketahanan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS); pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga; pendampingan keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita); pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita); penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga; partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan; penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi; pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat.

3. **Sasaran strategis 3: Meningkatnya daya saing masyarakat**, dengan indikator **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali seratus persen.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja, indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berada dalam kategori BERHASIL, dengan nilai 67,52 dibandingkan target tahun 2024 sebesar 63,08, di mana capaiannya adalah 107,04%.

Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang melebihi target tersebut menunjukkan upaya Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan jumlah orang dewasa di Kota Malang dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja aktif maupun pencari kerja. Hal ini dilakukan antara lain dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi; pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; penempatan tenaga kerja melalui layanan AKAD (



Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal); penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan; pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan; pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di Kota Malang; penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula; peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan; pembinaan kewirausahaan kepramukaan

4. **Sasaran strategis 4: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif**, dengan indikator **Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif**. Ekonomi kreatif adalah istilah yang mengacu pada sektor ekonomi yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang menciptakan nilai tambah melalui ekspresi kreatif, budaya, dan intelektual.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja, indikator Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif berada dalam kategori BERHASIL, dengan nilai 5,93% dibandingkan target tahun 2024 sebesar 5-6%, di mana capaiannya adalah 100%.

Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kreatif tersebut menunjukkan upaya Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Malang antara lain melalui pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan manusia pariwisata, fasilitasi penguatan kekayaan intelektual, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui optimalisasi Malang Creative Center (MCC), pengembangan dan pemasaran pariwisata, penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan kapasitas pelaku UMKM, pemberdayaan UMKM, penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri, pengawasan izin usaha industri yang terbit melalui OSS, pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, serta meningkatkan upaya penggunaan produk dalam negeri.

5. **Sasaran strategis 5: Meningkatnya potensi Pendapatan Asli Daerah**, dengan indikator **Rasio PAD**. Rasio PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah jumlah Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah Pendapatan Daerah.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja, indikator Rasio PAD berada dalam kategori SANGAT BERHASIL, dengan nilai 0,36 dibandingkan target tahun 2024 sebesar 0,29, di mana capaiannya adalah 124,14%.

Capaian Rasio PAD tersebut menunjukkan upaya Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kemandirian keuangan di Kota Malang, antara lain melalui peningkatan layanan perpajakan (Gebyar Sadar Pajak, Sumbang Kelurahan, Singgah Perumahan, dan lain-lain), pemasangan e-tax, operasi gabungan dengan Satpol PP, penyiapan lahan parkir, optimalisasi infrastruktur e-parkir, dan pendataan secara intensif pada jenis pajak lainnya serta intensifikasi dan ekstensifikasi secara berkelanjutan.

6. **Sasaran strategis 6: Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu**, dengan indikator **Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)**. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja, indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) berada dalam kategori BERHASIL, dengan nilai 4,53 dibandingkan target tahun 2024 sebesar 4,52, di mana capaiannya adalah 100,22%.

Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) tersebut menunjukkan upaya Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Malang antara lain melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, drainase, dan rehabilitasi



jaringan irigasi dan penampung air; penyediaan dan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan; rehabilitasi rumah korban bencana; perbaikan rumah tidak layak huni; peremajaan kawasan permukiman kumuh; pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala bangunan gedung; pengembangan jasa konstruksi; penataan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional, dan kawasan strategis; penyediaan air minum bagi masyarakat; pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah; penyelenggaraan penataan ruang, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ); dan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan.

- 7. Sasaran strategis 7: Meningkatnya pembangunan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).** Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja, indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam kategori BERHASIL, dengan nilai 61,76 dibandingkan target tahun 2024 sebesar 57,39, di mana capaiannya adalah 107,61%.

Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) tersebut menunjukkan upaya Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD); pengawasan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan; penyusunan rekomendasi dan/atau persetujuan teknis di bidang lingkungan hidup; pencegahan dan/atau

kerusakan lingkungan hidup; pengujian kualitas lingkungan hidup; pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup; pendampingan ke sekolah-sekolah Adiwiyata dan Program *Eco Pesantren*; pemberian penghargaan lingkungan hidup; penyelenggaraan lomba Kampung Bersinar; penyelesaian pengaduan masyarakat; penanganan persampahan; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan; pengembangan kapasitas dan penguatan Satgas Kebencanaan; mitigasi bencana; respon cepat darurat bencana; serta kerja sama dan kemitraan dalam penanggulangan bencana.

8. **Sasaran strategis 8: Meningkatnya kualitas perlindungan sosial dan daya beli masyarakat**, dengan indikator:

a. **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

Definisi: Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Semakin sedikit jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, maka semakin baik kualitas perlindungan sosial.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja, indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam kategori SANGAT BERHASIL, dengan nilai 12,53% dibandingkan target tahun 2024 sebesar 14,81%, di mana capaiannya adalah 115,395%.

Capaian Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tersebut menunjukkan upaya Pemerintah Kota Malang dalam pemeliharaan anak terlantar; fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga; pengelolaan data fakir miskin;

penyediaan bantuan untuk korban bencana; peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat; rehabilitas sosial; pengelolaan taman makam pahlawan; pemenuhan hak anak; perlindungan perempuan; dan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.

#### **b. Indeks Daya Beli/*Purchasing Power Parity***

Definisi: Daya beli merujuk pada kemampuan finansial individu atau kelompok untuk membeli barang dan jasa.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja, indikator Indeks Daya Beli/*Purchasing Power Parity* dalam kategori BERHASIL, walaupun belum mencapai target 100%. Adapun nilai Indeks Daya Beli/*Purchasing Power Parity* adalah 0,87 dibandingkan target tahun 2024 sebesar 0,884, di mana capaiannya adalah 98,42%. Adapun nilai Indeks Daya Beli/*Purchasing Power Parity* tahun 2024 sama dengan nilai tahun 2023, yaitu 0,87.

Capaian Indeks Daya Beli/*Purchasing Power Parity* tersebut menunjukkan upaya Pemerintah Kota Malang antara lain melalui pelaksanaan operasi pasar; pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat; pelaksanaan metrologi legal; pengawasan dan penyuluhan bagi pelaku usaha di bidang metrologi legal; pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya; pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; pendampingan dan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian; pengembangan kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh pertanian; pengelolaan perikanan budidaya; pemberdayaan pembudidaya ikan; pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya; serta pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.



9. **Sasaran strategis 9: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan**, dengan indikator:

**a. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)**

Definisi: Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dimaksudkan untuk mewakili ukuran capaian pembangunan nonfisik yang bisa memotret manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja, indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dalam kategori BERHASIL, dengan nilai 87,56 dibandingkan target tahun 2024 sebesar 86,09, di mana capaiannya adalah 101,71%.

Capaian Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) menunjukkan upaya Pemerintah Kota Malang antara lain melalui perlindungan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban, edukasi pencegahan dan pengendalian kebakaran, peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas; pengadaan dan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri; penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan; pembinaan paskibra dan purna paskibra; koordinasi bidang kewaspadaan dini, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, politik, etika budaya politik, dan peningkatan demokrasi; fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; kerjasama intelijen; pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing; fasilitasi lembaga pemerintahan, perwakilan, dan partai politik; pemantauan situasi politik di daerah; pemberdayaan dan pengawasan ormas; dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

**b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Definisi: Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara

perempuan dan laki-laki dalam suatu masyarakat berdasarkan beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja, indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dalam kategori BERHASIL, dengan nilai 95,67 dibandingkan target tahun 2024 sebesar 95,575, di mana capaiannya adalah 100,10%.

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan upaya Pemerintah Kota Malang antara lain sosialisasi dan advokasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG); pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

**10. Sasaran strategis 10: Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum, dengan indikator Persentase Perda yang Ditegakkan.**

Persentase Perda yang Ditegakkan adalah jumlah Perda yang mengandung sanksi yang ditegakkan dibagi dengan jumlah Perda yang mengandung sanksi dikali seratus persen.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja, indikator Persentase Perda yang Ditegakkan dalam kategori BERHASIL, dengan nilai 100% dibandingkan target tahun 2024 sebesar 100%, di mana capaiannya adalah 100%.

Capaian indikator Persentase Perda yang Ditegakkan menunjukkan upaya Pemerintah Kota Malang antara lain melalui sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyusunan produk hukum daerah,

bantuan hukum, dan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum.

**11. Sasaran strategis 11: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien**, dengan indikator:

**a. Nilai SAKIP**

Nilai SAKIP diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian PANRB.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja, indikator Nilai SAKIP dalam kategori BERHASIL walaupun belum tercapai 100%, dengan nilai 80,08 dibandingkan target tahun 2024 sebesar 81,49, di mana capaiannya adalah 98,27%.

Capaian indikator Nilai SAKIP menunjukkan upaya Pemerintah Kota Malang antara lain melalui pelayanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik; layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko; bimbingan teknis kepada pelaku usaha; promosi dan pengawasan penanaman modal; pengelolaan arsip dinamis dan statis daerah; peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dalam database kependudukan; pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting; analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah; koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan; pengelolaan data kelitbangan dan peraturan; penelitian dan pengembangan bidang sosial, kependudukan, ekonomi dan pembangunan; pengembangan inovasi dan teknologi; bantuan bea siswa utk warga miskin jenjang SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi; bantuan untuk guru



ngaji, guru sekolah minggu, modin qori, muazin, guru hafidz quran (huffadz); administrasi tata pemerintahan; kerja sama daerah; pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat; pelaksanaan kebijakan perekonomian; pelaksanaan administrasi pembangunan; pengelolaan pengadaan barang dan jasa; pemantauan kebijakan sumber daya alam; penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan.

#### **b. Opini BPK**

Opini BPK adalah penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja, indikator Opini BPK dalam kategori BERHASIL, dengan nilai 100% (WTP) dibandingkan target tahun 2024 sebesar 100% (WTP), di mana capaiannya adalah 100%.

Capaian indikator Opini BPK menunjukkan upaya Pemerintah Kota Malang antara lain melalui koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan rencana anggaran daerah, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah; pemanfaatan dan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan; Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah.

#### **c. Maturitas SPIP**

Maturitas SPIP adalah hasil evaluasi SPIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).



Pada tabel ikhtisar capaian kinerja, indikator Maturitas SPIP dalam kategori BERHASIL, dengan nilai 3,394 dibandingkan target tahun 2024 sebesar 3,20, di mana capaiannya adalah 106,06%.

Capaian indikator Maturitas SPIP menunjukkan upaya Pemerintah Kota Malang antara lain melalui reviu laporan keuangan; kerjasama pengawasan internal; monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP; penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah; perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; pendampingan dan asistensi; pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; dan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD.

**12. Sasaran strategis 12: Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN, dengan indikator Nilai Sistem Merit.**

Sistem Merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja, indikator Nilai Sistem Merit yang digunakan adalah hasil penilaian pada tahun 2023, karena pada tahun 2024 KASN tidak melaksanakan penilaian. Indikator ini dalam kategori BERHASIL walaupun belum tercapai 100%, dengan nilai 297 dibandingkan target tahun 2024 sebesar 330, di mana capaiannya adalah 90%.

Capaian indikator Nilai Sistem Merit menunjukkan upaya Pemerintah Kota Malang antara lain melalui pengadaan, pemberhentian, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi, penilaian dan evaluasi kinerja ASN; pengembangan kompetensi teknis; sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi



manajerial dan fungsional; pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan.

**13. Sasaran strategis 13: Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, dengan indikator Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).**

Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah Laporan Hasil Evaluasi Kematangan SPBE oleh Kementerian PANRB.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja, indikator Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam kategori SANGAT BERHASIL, dengan nilai 4,24 dibandingkan target tahun 2024 sebesar 3,02, di mana capaiannya adalah 140,40%.

Capaian indikator Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan upaya Pemerintah Kota Malang antara lain melalui pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan; penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan; penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah; pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah; penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah; penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah; koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral; peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi; membangun metadata statistik sektoral; monitoring opini dan aspirasi publik; pengelolaan konten dan media komunikasi publik, serta perencanaan media komunikasi publik; pelayanan informasi publik; penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas.

## 6. Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6

Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | KINERJA |           |             | ANGGARAN           |                    |             | Efisiensi (%) |
|--|--|---------|-----------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|
|  |  | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN (%) | PAGU               | REALISASI          | CAPAIAN (%) |               |
| Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter   | Rata-rata lama sekolah                                   | 10,96   | 11,14     | 101,64%     | 245.673.735.092,00 | 240.115.072.377,81 | 97,74%      | 102,87%       |
|  | Harapan lama sekolah                                     | 15,88   | 15,79     | 99,43%      |                    |                    |             |               |
|  | rata-rata  |         |           | 100,54%     |                    |                    |             |               |
| Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat   | Angka harapan hidup                                      | 75,32   | 75,54     | 100,29%     | 342.616.329.392,00 | 326.633.438.331,88 | 95,34%      | 105,20%       |
| Meningkatnya daya saing masyarakat   | Tingkat partisipasi angkatan kerja                       | 67,58   | 67,52     | 99,91%      | 6.420.980.728,00   | 6.324.264.621,00   | 98,49%      | 101,44%       |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif   | Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif                   | 5-6%    | 5,93%     | 100,00%     | 44.508.632.523,00  | 42.709.717.120,00  | 95,96%      | 104,21%       |
| Meningkatnya potensi pendapatan asli daerah  | Rasio PAD.   | 0,34    | 0,36      | 105,88%     | 26.694.191.458,00  | 24.153.182.573,00  | 90,48%      | 117,02%       |
| Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu          | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)             | 4,52    | 4,53      | 100,22%     | 319.094.923.266,00 | 303.097.845.409,66 | 94,99%      | 105,51%       |
| Meningkatnya pembangunan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                  | 59,92   | 61,76     | 103,07%     | 49.220.603.038,00  | 47.632.258.594,60  | 96,77%      | 106,51%       |
| Meningkatnya kualitas perlindungan sosial dan daya beli masyarakat                         | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 14,81%  | 12,50%    | 115,60%     | 40.638.815.970,00  | 31.739.656.339,00  | 78,10%      | 137,01%       |
|  | Indeks Daya Beli / Purchasing Power Parity               | 0,884   | 0,87      | 98,42%      |                    |                    |             |               |
|  | rata-rata  |         |           | 107,01%     |                    |                    |             |               |



| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | KINERJA |           |                | ANGGARAN                    |                             |               | Efisiensi (%)  |
|--|--|---------|-----------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
|  |  | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN (%)    | PAGU                        | REALISASI                   | CAPAIAN (%)   |                |
| Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan         | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)                            | 86,09   | 87,56     | 101,71%        | 182.331.323.990,00          | 174.717.033.515,85          | 95,82%        | 105,25%        |
|  | Indeks pembangunan Gender (IPG)                                  | 95,670  | 95,67     | 100,00%        |                             |                             |               |                |
|  | rata-rata  |         |           | 100,85%        |                             |                             |               |                |
| Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum               | Persentase perda yang ditegakkan                                 | 100%    | 100%      | 100,00%        | 6.037.710.092,00            | 4.260.234.426,00            | 70,56%        | 141,72%        |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien | Nilai Sakip  | 81,80   | 80,08     | 97,90%         | 1.317.656.855.835,00        | 1.215.305.940.929,93        | 92,23%        | 108,40%        |
|  | Opini BPK;   | WTP     | WTP       | 100%           |                             |                             |               |                |
|  | Maturitas SPIP   | 3,33    | 3,394     | 102,04%        |                             |                             |               |                |
|  | rata-rata  |         |           | 99,98%         |                             |                             |               |                |
| Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN                        | Nilai Sistem Merit   | 330     | 297       | 90,00%         | 9.169.541.599,00            | 8.607.746.529,00            | 93,87%        | 95,87%         |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik              | Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3,82    | 4,24      | 110,99%        | 30.635.170.866,00           | 30.344.643.421,00           | 99,05%        | 112,06%        |
|  | rata-rata  |         |           | <b>101,51%</b> | <b>2.620.698.813.849,00</b> | <b>2.455.641.034.188,73</b> | <b>93,70%</b> | <b>108,33%</b> |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Kota Malang pada tahun 2024 adalah 101,51%, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 93,70%. Dari kedua capaian tersebut diperoleh angka efisiensi sebesar 108,30%.

## 7. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Tabel 3.7

### Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan

| SASARAN STRATEGIS                                | INDIKATOR KINERJA                           | ANGGARAN PER SASARAN | REALISASI PER SASARAN | PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA             |  |                    |                    |            |
|--|---|----------------------|-----------------------|---|--|--------------------|--------------------|------------|
|  |   |                      |                       | PROGRAM   | PERANGKAT DAERAH                         | ANGGARAN           | REALISASI          | PERSENTASE |
| Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter | Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah | 245.673.735.092,00   | 240.115.072.377,81    | Program pengelolaan pendidikan  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          | 240.216.504.694,00 | 234.768.127.029,81 | 97,73%     |
|  |   |                      |                       | Program pengembangan kurikulum  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          | 4.000.000,00       | 4.000.000,00       | 100,00%    |
|  |   |                      |                       | Program pendidik dan tenaga kependidikan                                    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          | 152.576.280,00     | 126.296.142,00     | 82,78%     |
|  |   |                      |                       | Program pengembangan kebudayaan   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          | 1.075.000.000,00   | 1.071.930.000,00   | 99,71%     |
|  |   |                      |                       | Program Pembinaan Sejarah   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          | 100.000.000,00     | 98.968.500,00      | 98,97%     |
|  |   |                      |                       | Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya                            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          | 48.000.000,00      | 48.000.000,00      | 100,00%    |
|  |   |                      |                       | Program pengelolaan permuseuman   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          | 1.063.245.584,00   | 1.016.222.769,00   | 95,58%     |
|  |   |                      |                       | Program pengembangan kesenian tradisional                                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          | 1.750.000.000,00   | 1.739.650.000,00   | 99,41%     |
|  |   |                      |                       | Program pembinaan perpustakaan  | Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah | 1.174.408.534,00   | 1.152.502.937,00   | 98,13%     |
|  |   |                      |                       | Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno                        | Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah | 90.000.000,00      | 89.375.000,00      | 99,31%     |
| Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup                         | 342.616.329.392,00   | 326.633.438.331,87    | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan                          | 218.147.859.274,00 | 209.477.802.388,00 | 96,03%     |

| SASARAN STRATEGIS                  | INDIKATOR KINERJA                  | ANGGARAN PER SASARAN | REALISASI PER SASARAN | PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA |  |                   |                   |            |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|---|--|-------------------|-------------------|------------|
|                                    |                                    |                      |                       | PROGRAM   | PERANGKAT DAERAH   | ANGGARAN          | REALISASI         | PERSENTASE |
|                                    |                                    |                      |                       | Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan     | Dinas Kesehatan  | 849.795.400,00    | 809.908.072,00    | 95,31%     |
|                                    |                                    |                      |                       | Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman     | Dinas Kesehatan  | 749.154.000,00    | 665.083.950,00    | 88,78%     |
|                                    |                                    |                      |                       | Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan                | Dinas Kesehatan  | 18.517.621.400,00 | 18.160.498.581,00 | 98,07%     |
|                                    |                                    |                      |                       | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota     | Dinas Kesehatan  | 70.075.243.899,00 | 65.691.560.932,77 | 93,74%     |
|                                    |                                    |                      |                       | Program pengendalian penduduk                                   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 280.300.000,00    | 244.389.890,00    | 87,19%     |
|                                    |                                    |                      |                       | Program pembinaan keluarga berencana (KB)                       | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 2.261.185.740,00  | 1.977.298.345,00  | 87,45%     |
|                                    |                                    |                      |                       | Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)    | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 5.819.252.792,00  | 5.632.366.757,00  | 96,79%     |
|                                    |                                    |                      |                       | Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan          | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  | 25.915.916.887,00 | 23.974.529.416,10 | 92,51%     |
| Meningkatnya daya saing masyarakat | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 6.420.980.728,00     | 6.324.264.621,00      | Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja          | Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                  | 1.835.245.250,00  | 1.829.866.338,00  | 99,71%     |



| SASARAN STRATEGIS                        | INDIKATOR KINERJA           | ANGGARAN PER SASARAN | REALISASI PER SASARAN | PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPI PERNYATAAN KINERJA                                     |   |                  |                  |            |
|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--|---|------------------|------------------|------------|
|  |                             |                      |                       | PROGRAM  | PERANGKAT DAERAH  | ANGGARAN         | REALISASI        | PERSENTASE |
|  |                             |                      |                       | Program penempatan tenaga kerja  | Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 215.865.000,00   | 215.865.000,00   | 100,00%    |
|  |                             |                      |                       | Program hubungan industrial  | Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 370.584.050,00   | 299.816.250,00   | 80,90%     |
|  |                             |                      |                       | Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan   | Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                             | 3.299.286.428,00 | 3.280.513.128,00 | 99,43%     |
|  |                             |                      |                       | Program pengembangan kapasitas kepramukaan   | Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                             | 700.000.000,00   | 698.203.905,00   | 99,74%     |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif | Pertumbuhan ekonomi kreatif | 44.508.632.523,00    | 42.709.717.120,00     | Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif                                    | Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                             | 2.317.016.864,00 | 2.299.465.370,00 | 99,24%     |
|  |                             |                      |                       | Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual | Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                             | 224.300.000,00   | 223.890.000,00   | 99,82%     |
|  |                             |                      |                       | Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata  | Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                             | 1.777.046.012,00 | 1.545.177.043,00 | 86,95%     |
|  |                             |                      |                       | Program pemasaran pariwisata   | Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                             | 305.415.577,00   | 304.262.695,00   | 99,62%     |
|  |                             |                      |                       | Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi  | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan                         | 191.450.000,00   | 190.749.900,00   | 99,63%     |
|  |                             |                      |                       | Program pendidikan dan latihan perkoperasian   | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan                         | 123.405.000,00   | 122.894.752,00   | 99,59%     |

| SASARAN STRATEGIS                    | INDIKATOR KINERJA | ANGGARAN PER SASARAN | REALISASI PER SASARAN | PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA          |   |                   |                   |            |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-------------------|-------------------|------------|
|                                      |                   |                      |                       | PROGRAM  | PERANGKAT DAERAH                              | ANGGARAN          | REALISASI         | PERSENTASE |
|                                      |                   |                      |                       | Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi                           | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 260.945.000,00    | 260.587.952,00    | 99,86%     |
|                                      |                   |                      |                       | Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi                             | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 204.413.488,00    | 202.004.800,00    | 98,82%     |
|                                      |                   |                      |                       | Program pengembangan UMKM  | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 693.633.180,00    | 685.958.485,00    | 98,89%     |
|                                      |                   |                      |                       | Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 4.130.281.063,00  | 4.109.022.426,00  | 99,49%     |
|                                      |                   |                      |                       | Program perencanaan dan pembangunan industri                             | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 22.203.366.628,00 | 20.933.661.363,00 | 94,28%     |
|                                      |                   |                      |                       | Program pengelolaan sistem informasi industri nasional                   | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 50.000.000,00     | 48.270.000,00     | 96,54%     |
|                                      |                   |                      |                       | Program pengendalian izin usaha industri                                 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 20.000.000,00     | 14.490.000,00     | 72,45%     |
|                                      |                   |                      |                       | Program peningkatan sarana distribusi perdagangan                        | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 10.824.517.848,00 | 10.598.811.587,00 | 97,91%     |
|                                      |                   |                      |                       | Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri                     | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 931.904.263,00    | 923.468.747,00    | 99,09%     |
|                                      |                   |                      |                       | Program perizinan dan pendaftaran perusahaan                             | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 197.917.600,00    | 194.662.000,00    | 98,36%     |
|                                      |                   |                      |                       | Program Pengembangan Ekspor  | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 53.020.000,00     | 52.340.000,00     | 98,72%     |
| Meningkatnya potensi pendapatan asli | Rasio PAD         | 26.694.191.458,00    | 24.153.182.573,00     | Program pengelolaan pendapatan daerah                                    | Badan Pendapatan Daerah                       | 13.833.676.256,00 | 12.095.216.594,00 | 87,43%     |

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA                            | ANGGARAN PER SASARAN | REALISASI PER SASARAN | PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA |  |                   |                   |            |
|---|--|----------------------|-----------------------|---|--|-------------------|-------------------|------------|
|   |  |                      |                       | PROGRAM   | PERANGKAT DAERAH   | ANGGARAN          | REALISASI         | PERSENTASE |
| daerah  |  |                      |                       | Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)   | Dinas Perhubungan  | 12.860.515.202,00 | 12.057.965.979,00 | 93,76%     |
| Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) | 319.094.923.266,00   | 303.097.845.409,66    | Program penyelenggaraan jalan                                   | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 92.188.586.907,00 | 88.752.662.749,12 | 96,27%     |
|   |  |                      |                       | Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase            | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 60.680.573.165,00 | 59.066.789.865,21 | 97,34%     |
|   |  |                      |                       | Program pengelolaan sumber daya air (SDA)                       | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1.621.640.000,00  | 1.547.233.800,00  | 95,41%     |
|   |  |                      |                       | Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)   | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 13.629.476.100,00 | 12.624.804.133,00 | 92,63%     |
|   |  |                      |                       | Program pengembangan perumahan                                  | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 3.274.102.080,00  | 2.595.468.100,00  | 79,27%     |
|   |  |                      |                       | Program kawasan permukiman                                      | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 4.218.126.000,00  | 4.144.616.000,00  | 98,26%     |
|   |  |                      |                       | Program penataan bangunan gedung                                | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2.654.515.342,00  | 2.301.380.418,00  | 86,70%     |
|   |  |                      |                       | Program pengembangan jasa konstruksi                            | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan            | 900.000.000,00    | 858.689.500,00    | 95,41%     |



| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA                       | ANGGARAN PER SASARAN | REALISASI PER SASARAN | PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA   |  |                   |                   |            |
|---|---|----------------------|-----------------------|---|--|-------------------|-------------------|------------|
|   |   |                      |                       | PROGRAM   | PERANGKAT DAERAH   | ANGGARAN          | REALISASI         | PERSENTASE |
|   |   |                      |                       |   | Permukiman   |                   |                   |            |
|   |   |                      |                       | Program penataan bangunan dan lingkungannya   | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 200.000.000,00    | 199.408.000,00    | 99,70%     |
|   |   |                      |                       | Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum  | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 8.074.595.000,00  | 7.497.353.800,00  | 92,85%     |
|   |   |                      |                       | Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah  | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 24.053.998.924,00 | 21.522.037.812,00 | 89,47%     |
|   |   |                      |                       | Program penyelenggaraan penataan ruang  | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 3.657.680.020,00  | 3.307.093.498,00  | 90,42%     |
|   |   |                      |                       | Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)   | Dinas Perhubungan  | 15.946.863.247,00 | 15.208.785.451,00 | 95,37%     |
|   |   |                      |                       | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan  | Kecamatan  | 87.994.766.481,00 | 83.471.522.283,33 | 94,86%     |
| Meningkatnya pembangunan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 49.220.603.038,00    | 47.632.258.594,60     | Program perencanaan lingkungan hidup  | Dinas Lingkungan Hidup   | 230.000.000,00    | 224.673.320,00    | 97,68%     |
|   |   |                      |                       | Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) | Dinas Lingkungan Hidup   | 274.848.480,00    | 270.239.036,00    | 98,32%     |



| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | ANGGARAN PER SASARAN | REALISASI PER SASARAN | PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA  |  |                   |                   |            |
|--|--|----------------------|-----------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------|
|  |  |                      |                       | PROGRAM  | PERANGKAT DAERAH   | ANGGARAN          | REALISASI         | PERSENTASE |
|  |  |                      |                       | Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup                                      | Dinas Lingkungan Hidup   | 1.679.410.056,00  | 1.630.518.156,00  | 97,09%     |
|  |  |                      |                       | Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat               | Dinas Lingkungan Hidup   | 245.407.492,00    | 239.639.396,00    | 97,65%     |
|  |  |                      |                       | Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat  | Dinas Lingkungan Hidup   | 357.822.108,00    | 350.027.408,00    | 97,82%     |
|  |  |                      |                       | Program penanganan pengaduan lingkungan hidup  | Dinas Lingkungan Hidup   | 122.182.900,00    | 119.113.604,00    | 97,49%     |
|  |  |                      |                       | Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)   | Dinas Lingkungan Hidup   | 20.143.744.892,00 | 19.590.900.234,60 | 97,26%     |
|  |  |                      |                       | Program pengelolaan persampahan  | Dinas Lingkungan Hidup   | 19.547.083.221,00 | 18.935.828.100,00 | 96,87%     |
|  |  |                      |                       | Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) | Dinas Lingkungan Hidup   | 158.695.539,00    | 149.645.410,00    | 94,30%     |
|  |  |                      |                       | Program penanggulangan bencana   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | 6.461.408.350,00  | 6.121.673.930,00  | 94,74%     |
| Meningkatnya kualitas perlindungan sosial dan daya beli masyarakat | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 40.638.815.970,00    | 31.739.656.339,00     | Program perlindungan dan jaminan sosial  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 15.469.396.300,00 | 13.541.075.512,00 | 87,53%     |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA    | ANGGARAN PER SASARAN | REALISASI PER SASARAN | PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA |  |                  |                  |            |
|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---|--|------------------|------------------|------------|
|                   |                      |                      |                       | PROGRAM   | PERANGKAT DAERAH   | ANGGARAN         | REALISASI        | PERSENTASE |
|                   | Indeks Daya Beli/PPP |                      |                       | Program penanganan bencana                                      | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 176.604.000,00   | 127.003.432,00   | 71,91%     |
|                   |                      |                      |                       | Program pemberdayaan sosial                                     | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 5.279.911.026,00 | 4.777.151.327,00 | 90,48%     |
|                   |                      |                      |                       | Program rehabilitasi sosial                                     | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 9.624.879.480,00 | 3.714.166.141,00 | 38,59%     |
|                   |                      |                      |                       | Program pengelolaan taman makam pahlawan                        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 127.036.468,00   | 125.314.542,00   | 98,64%     |
|                   |                      |                      |                       | Program perlindungan khusus anak                                | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 356.769.422,00   | 308.378.680,00   | 86,44%     |



| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | ANGGARAN PER SASARAN | REALISASI PER SASARAN | PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA         |  |                  |                  |            |
|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---|--|------------------|------------------|------------|
|                   |                   |                      |                       | PROGRAM   | PERANGKAT DAERAH   | ANGGARAN         | REALISASI        | PERSENTASE |
|                   |                   |                      |                       | Program Pemenuhan Hak Anak  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 602.500.726,00   | 560.343.625,00   | 93,00%     |
|                   |                   |                      |                       | Program perlindungan perempuan  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 410.190.250,00   | 296.173.050,00   | 72,20%     |
|                   |                   |                      |                       | Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting     | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan  | 2.892.350.000,00 | 2.857.925.000,00 | 98,81%     |
|                   |                   |                      |                       | Program standarisasi dan perlindungan konsumen                          | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan  | 460.000.000,00   | 420.465.014,00   | 91,41%     |
|                   |                   |                      |                       | Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat       | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian   | 1.983.090.892,00 | 1.844.140.799,00 | 92,99%     |
|                   |                   |                      |                       | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian                    | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian   | 800.189.200,00   | 744.509.907,00   | 93,04%     |
|                   |                   |                      |                       | Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian                 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian   | 38.560.000,00    | 29.000.000,00    | 75,21%     |
|                   |                   |                      |                       | Program penyuluhan pertanian  | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian   | 20.805.000,00    | 19.494.000,00    | 93,70%     |
|                   |                   |                      |                       | Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian   | 236.617.800,00   | 234.754.047,00   | 99,21%     |

| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | ANGGARAN PER SASARAN | REALISASI PER SASARAN | PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPI PERNYATAAN KINERJA |  |                  |                  |            |
|--|---|----------------------|-----------------------|--|--|------------------|------------------|------------|
|  |   |                      |                       | PROGRAM  | PERANGKAT DAERAH   | ANGGARAN         | REALISASI        | PERSENTASE |
|  |   |                      |                       | Program pengelolaan perikanan budidaya                         | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian   | 1.862.291.406,00 | 1.853.771.823,00 | 99,54%     |
|  |   |                      |                       | Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan               | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian   | 297.624.000,00   | 285.989.440,00   | 96,09%     |
| Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)   | 182.331.323.990,00   | 174.717.033.515,85    | Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan      | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 1.187.816.718,00 | 1.150.536.180,00 | 96,86%     |
|  |   |                      |                       | Program peningkatan kualitas keluarga                          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 1.148.513.000,00 | 852.602.800,00   | 74,24%     |
|  | Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum                                      |                      |                       | Satpol PP  | 6.629.043.291,00   | 6.052.276.528,00 | 91,30%           |            |
|  | Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran |                      |                       | Satpol PP  | 2.807.182.660,00   | 2.034.582.461,00 | 72,48%           |            |
|  | Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan                              |                      |                       | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                              | 2.341.265.000,00   | 2.282.171.000,00 | 97,48%           |            |
|  | Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya                  |                      |                       | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                              | 898.500.000,00   | 809.645.379,00   | 90,11%           |            |
|  | Indeks Pembangunan Gender   |                      |                       |  |  |                  |                  |            |

| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA                | ANGGARAN PER SASARAN | REALISASI PER SASARAN | PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA  |   |                   |                   |            |
|--|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-------------------|-------------------|------------|
|  |                                  |                      |                       | PROGRAM  | PERANGKAT DAERAH  | ANGGARAN          | REALISASI         | PERSENTASE |
|  |                                  |                      |                       | Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial                              | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                     | 10.115.964.758,00 | 9.927.394.602,00  | 98,14%     |
|  |                                  |                      |                       | Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                     | 47.570.154.040,00 | 47.344.804.040,00 | 99,53%     |
|  |                                  |                      |                       | Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                     | 346.615.000,00    | 227.615.000,00    | 65,67%     |
|  |                                  |                      |                       | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan   | Kecamatan   | 93.738.243.515,00 | 89.244.902.979,85 | 95,21%     |
|  |                                  |                      |                       | Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum  | Kecamatan   | 15.308.890.008,00 | 14.573.712.546,00 | 95,20%     |
|  |                                  |                      |                       | Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum   | Kecamatan   | 239.136.000,00    | 216.790.000,00    | 90,66%     |
| Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum | Persentase perda yang ditegakkan | 6.037.710.092,00     | 4.260.234.426,00      | Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum   | Satpol PP   | 3.187.646.092,00  | 1.584.412.880,00  | 49,70%     |
|  |                                  |                      |                       | Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat  | Sekretariat Daerah  | 2.850.064.000,00  | 2.675.821.546,00  | 93,89%     |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik          | Nilai SAKIP                      | 1.317.656.855.835,00 | 1.215.305.940.929,93  | Program pelayanan penanaman modal  | Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1.151.579.340,00  | 1.146.705.754,00  | 99,58%     |

| SASARAN STRATEGIS               | INDIKATOR KINERJA | ANGGARAN PER SASARAN | REALISASI PER SASARAN                                       | PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA    |   |                      |                   |            |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|---|--|---|----------------------|-------------------|------------|
|                                 |                   |                      |   | PROGRAM  | PERANGKAT DAERAH  | ANGGARAN             | REALISASI         | PERSENTASE |
| Opini BPK<br><br>Maturitas SPIP |                   |                      |   | Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal                   | Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 545.608.730,00       | 536.270.752,00    | 98,29%     |
|                                 |                   |                      |   | Program promosi penanaman modal                                    | Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 224.852.000,00       | 223.089.000,00    | 99,22%     |
|                                 |                   |                      |   | Program pengelolaan arsip  | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah                                   | 427.310.940,00       | 424.729.225,00    | 99,40%     |
|                                 |                   |                      |   | Program pendaftaran penduduk                                       | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                               | 1.341.442.380,00     | 1.325.953.848,00  | 98,85%     |
|                                 |                   |                      |   | Program Pencatatan Sipil   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                               | 1.893.368.800,00     | 1.870.540.480,00  | 98,79%     |
|                                 |                   |                      |   | Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                  | 1.526.129.200,00     | 1.501.702.651,00  | 98,40%     |
|                                 |                   |                      |   | Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                  | 5.251.133.037,00     | 4.970.818.507,00  | 94,66%     |
|                                 |                   |                      |   | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                         | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                  | 1.274.393.825,00     | 1.255.851.663,00  | 98,55%     |
|                                 |                   |                      |   | Program pengelolaan keuangan daerah                                | Badan Keuangan dan Aset Daerah  | 7.130.246.187,00     | 2.427.013.059,00  | 34,04%     |
|                                 |                   |                      |   | Program pengelolaan barang milik daerah                            | Badan Keuangan dan Aset Daerah  | 4.890.041.038,00     | 3.244.280.735,00  | 66,34%     |
|                                 |                   |                      |   | Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat                      | Sekretariat Daerah  | 23.059.526.200,00    | 21.827.981.003,00 | 94,66%     |
|                                 |                   |                      |   | Program perekonomian dan pembangunan                               | Sekretariat Daerah  | 2.468.132.512,00     | 2.252.958.071,00  | 91,28%     |
|                                 |                   |                      | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Semua Perangkat Daerah   | 1.172.592.764.139,00  | 1.094.394.510.497,33 | 93,33%            |            |



| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA      | ANGGARAN PER SASARAN | REALISASI PER SASARAN | PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPI PERNYATAAN KINERJA |  |                   |                   |            |
|---|------------------------|----------------------|-----------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------|
|   |                        |                      |                       | PROGRAM  | PERANGKAT DAERAH   | ANGGARAN          | REALISASI         | PERSENTASE |
|   |                        |                      |                       | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik      | Kecamatan  | 42.510.769.596,00 | 37.073.096.985,60 | 87,21%     |
|   |                        |                      |                       | Program penyelenggaraan pengawasan                             | Inspektorat  | 779.508.300,00    | 398.713.500,00    | 51,15%     |
|   |                        |                      |                       | Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi        | Inspektorat  | 425.363.100,00    | 366.364.475,00    | 86,13%     |
|   |                        |                      |                       | Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD             | Sekretariat DPRD   | 50.164.686.511,00 | 40.065.360.724,00 | 79,87%     |
| Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN           | Indeks Sistem Merit    | 9.169.541.599,00     | 8.607.746.529,00      | Program kepegawaian daerah                                     | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM                               | 4.869.494.599,00  | 4.410.845.408,00  | 90,58%     |
|   |                        |                      |                       | Program pengembangan sumber daya manusia                       | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM                               | 4.033.659.000,00  | 3.930.848.650,00  | 97,45%     |
|   |                        |                      |                       | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota    | Sekretariat Daerah   | 266.388.000,00    | 266.052.471,00    | 99,87%     |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik | Indeks kematangan SPBE | 30.635.170.866,00    | 30.344.643.421,00     | Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal  | Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 231.202.250,00    | 229.372.879,00    | 99,21%     |
|   |                        |                      |                       | Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                              | 350.084.748,00    | 347.153.560,00    | 99,16%     |
|   |                        |                      |                       | Program pengelolaan profil kependudukan                        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                              | 96.500.000,00     | 87.848.600,00     | 91,03%     |
|   |                        |                      |                       | Program pengelolaan aplikasi informatika                       | Dinas Komunikasi dan Informatika                                     | 20.882.840.000,00 | 20.724.278.480,00 | 99,24%     |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | ANGGARAN PER SASARAN | REALISASI PER SASARAN | PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA |                                  |                             |                             |               |
|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
|                   |                   |                      |                       | PROGRAM   | PERANGKAT DAERAH                 | ANGGARAN                    | REALISASI                   | PERSENTASE    |
|                   |                   |                      |                       | Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi   | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1.288.092.688,00            | 1.256.943.042,00            | 97,58%        |
|                   |                   |                      |                       | Program penyelenggaraan statistik sektoral                      | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1.420.948.500,00            | 1.416.658.500,00            | 99,70%        |
|                   |                   |                      |                       | Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik             | Dinas Komunikasi dan Informatika | 6.365.502.680,00            | 6.282.388.360,00            | 98,69%        |
|                   |                   |                      |                       |   |                                  | <b>2.620.698.813.849,00</b> | <b>2.455.641.034.188,72</b> | <b>93,70%</b> |

Tabel di atas menunjukkan anggaran masing-masing Sasaran Strategis, yang kemudian dijabarkan dalam anggaran masing-masing Program yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran Strategis tersebut. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran Kota Malang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.620.698.813.849,00. Realisasi anggaran Kota Malang tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.455.641.034.188,72, dengan realisasi sebesar 93,70%. Selisih Anggaran Kota Malang dengan Realisasinya Tahun 2024 adalah sebesar Rp 165.057.779.660,28.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai target kinerja tahun 2024. Dari 13 (tiga belas) sasaran strategis, capaian tertinggi adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator Indeks SPBE, yang didukung oleh beberapa program, yaitu:

1. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
3. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
4. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
6. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
7. Program Pengelolaan Informasi Dan komunikasi publik.

Sedangkan indikator dengan capaian terendah adalah Nilai Sistem Merit. Hal ini karena pada tahun 2024 KASN tidak melaksanakan penilaian Sistem Merit, sehingga yang digunakan sebagai acuan adalah capaian Nilai Sistem Merit Tahun 2023. Diharapkan pada tahun 2025, Kementerian/Lembaga yang mengampu akan melaksanakan penilaian Sistem Merit

## B. Realisasi Anggaran

Anggaran Kota Malang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.620.698.813.849,00. Realisasi anggaran Kota Malang tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.455.641.034.188,72, dengan realisasi sebesar 93,70%. Selisih Anggaran Kota Malang dengan Realisasinya Tahun 2024 adalah sebesar Rp 165.057.779.660,28.

Tabel 3.8  
Realisasi Anggaran Tahun 2024

| NO  | URAIAN                                   | JUMLAH (Rp)        |                    | CAPAIAN |
|---|--|--------------------|--------------------|---------|
|   |  | ANGGARAN           | REALISASI          |         |
| <b>Sasaran Strategis : Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter</b> |  |                    |                    |         |
| 1   | Program pengelolaan pendidikan           | 240.216.504.694,00 | 234.768.127.029,81 | 97,73%  |
| 2   | Program pengembangan kurikulum           | 4.000.000,00       | 4.000.000,00       | 100,00% |
| 3   | Program pendidik dan tenaga kependidikan | 152.576.280,00     | 126.296.142,00     | 82,78%  |
| 4   | Program pengembangan kebudayaan          |                    |                    | 99,71%  |



| NO  | URAIAN   | JUMLAH (Rp)        |                    | CAPAIAN |
|---|--|--------------------|--------------------|---------|
|   |  | ANGGARAN           | REALISASI          |         |
|   |  | 1.075.000.000,00   | 1.071.930.000,00   |         |
| 5   | Program Pembinaan Sejarah  | 100.000.000,00     | 98.968.500,00      | 98,97%  |
| 6   | Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya   | 48.000.000,00      | 48.000.000,00      | 100,00% |
| 7   | Program pengelolaan permuseuman  | 1.063.245.584,00   | 1.016.222.769,00   | 95,58%  |
| 8   | Program pengembangan kesenian tradisional  | 1.750.000.000,00   | 1.739.650.000,00   | 99,41%  |
| 9   | Program pembinaan perpustakaan   | 1.174.408.534,00   | 1.152.502.937,00   | 98,13%  |
| 10  | Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno   | 90.000.000,00      | 89.375.000,00      | 99,31%  |
| <b>Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat</b> |  |                    |                    |         |
| 11  | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat                        | 218.147.859.274,00 | 209.477.802.388,00 | 96,03%  |
| 12  | Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan  | 849.795.400,00     | 809.908.072,00     | 95,31%  |
| 13  | Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman  | 749.154.000,00     | 665.083.950,00     | 88,78%  |
| 14  | Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan   | 18.517.621.400,00  | 18.160.498.581,00  | 98,07%  |
| 15  | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota  | 70.075.243.899,00  | 65.691.560.932,77  | 93,74%  |
| 16  | Program pengendalian penduduk  | 280.300.000,00     | 244.389.890,00     | 87,19%  |
| 17  | Program pembinaan keluarga berencana (KB)  | 2.261.185.740,00   | 1.977.298.345,00   | 87,45%  |
| 18  | Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)                                       | 5.819.252.792,00   | 5.632.366.757,00   | 96,79%  |
| 19  | Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan   | 25.915.916.887,00  | 23.974.529.416,10  | 92,51%  |
| <b>Sasaran Strategis : Meningkatnya daya saing masyarakat</b>               |  |                    |                    |         |
| 20  | Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja   | 1.835.245.250,00   | 1.829.866.338,00   | 99,71%  |
| 21  | Program penempatan tenaga kerja  | 215.865.000,00     | 215.865.000,00     | 100,00% |
| 22  | Program hubungan industrial  | 370.584.050,00     | 299.816.250,00     | 80,90%  |
| 23  | Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan   | 3.299.286.428,00   | 3.280.513.128,00   | 99,43%  |
| 24  | Program pengembangan kapasitas kepramukaan   | 700.000.000,00     | 698.203.905,00     | 99,74%  |
| <b>Sasaran Strategis : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif</b>         |  |                    |                    |         |
| 25  | Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif                                    | 2.317.016.864,00   | 2.299.465.370,00   | 99,24%  |
| 26  | Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual | 224.300.000,00     | 223.890.000,00     | 99,82%  |
| 27  | Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata  | 1.777.046.012,00   | 1.545.177.043,00   | 86,95%  |
| 28  | Program pemasaran pariwisata   | 305.415.577,00     | 304.262.695,00     | 99,62%  |
| 29  | Program pengawasan dan pemeriksaan   |                    |                    | 99,63%  |



| NO   | URAIAN   | JUMLAH (Rp)       |                   | CAPAIAN |
|--|--|-------------------|-------------------|---------|
|  |  | ANGGARAN          | REALISASI         |         |
|  | koperasi   | 191.450.000,00    | 190.749.900,00    |         |
| 30   | Program pendidikan dan latihan perkoperasian                             | 123.405.000,00    | 122.894.752,00    | 99,59%  |
| 31   | Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi                           | 260.945.000,00    | 260.587.952,00    | 99,86%  |
| 32   | Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi                             | 204.413.488,00    | 202.004.800,00    | 98,82%  |
| 33   | Program pengembangan UMKM  | 693.633.180,00    | 685.958.485,00    | 98,89%  |
| 34   | Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) | 4.130.281.063,00  | 4.109.022.426,00  | 99,49%  |
| 35   | Program perencanaan dan pembangunan industri                             | 22.203.366.628,00 | 20.933.661.363,00 | 94,28%  |
| 36   | Program pengelolaan sistem informasi industri nasional                   | 50.000.000,00     | 48.270.000,00     | 96,54%  |
| 37   | Program pengendalian izin usaha industri                                 | 20.000.000,00     | 14.490.000,00     | 72,45%  |
| 38   | Program peningkatan sarana distribusi perdagangan                        | 10.824.517.848,00 | 10.598.811.587,00 | 97,91%  |
| 39   | Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri                     | 931.904.263,00    | 923.468.747,00    | 99,09%  |
| 40   | Program perizinan dan pendaftaran perusahaan                             | 197.917.600,00    | 194.662.000,00    | 98,36%  |
| 41   | Program Pengembangan Ekspor  | 53.020.000,00     | 52.340.000,00     | 98,72%  |
| <b>Sasaran Strategis : Meningkatnya potensi pendapatan asli daerah</b>                                       |  |                   |                   |         |
| 42   | Program pengelolaan pendapatan daerah                                    | 13.833.676.256,00 | 12.095.216.594,00 | 87,43%  |
| 43   | Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)            | 12.860.515.202,00 | 12.057.965.979,00 | 93,76%  |
| <b>Sasaran Strategis : Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu</b> |  |                   |                   |         |
| 44   | Program penyelenggaraan jalan  | 92.188.586.907,00 | 88.752.662.749,12 | 96,27%  |
| 45   | Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase                     | 60.680.573.165,00 | 59.066.789.865,21 | 97,34%  |
| 46   | Program pengelolaan sumber daya air (SDA)                                | 1.621.640.000,00  | 1.547.233.800,00  | 95,41%  |
| 47   | Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)            | 13.629.476.100,00 | 12.624.804.133,00 | 92,63%  |
| 48   | Program pengembangan perumahan   | 3.274.102.080,00  | 2.595.468.100,00  | 79,27%  |
| 49   | Program kawasan permukiman   | 4.218.126.000,00  | 4.144.616.000,00  | 98,26%  |
| 50   | Program penataan bangunan gedung   | 2.654.515.342,00  | 2.301.380.418,00  | 86,70%  |
| 51   | Program pengembangan jasa konstruksi                                     | 900.000.000,00    | 858.689.500,00    | 95,41%  |
| 52   | Program penataan bangunan dan lingkungannya                              | 200.000.000,00    | 199.408.000,00    | 99,70%  |
| 53   | Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum         | 8.074.595.000,00  | 7.497.353.800,00  | 92,85%  |
| 54   | Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah                   | 24.053.998.924,00 | 21.522.037.812,00 | 89,47%  |
| 55   | Program penyelenggaraan penataan   |                   |                   | 90,42%  |



| NO   | URAIAN  | JUMLAH (Rp)       |                   | CAPAIAN |
|--|---|-------------------|-------------------|---------|
|  |   | ANGGARAN          | REALISASI         |         |
|  | ruang   | 3.657.680.020,00  | 3.307.093.498,00  |         |
| 56   | Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)   | 15.946.863.247,00 | 15.208.785.451,00 | 95,37%  |
| 57   | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan  | 87.994.766.481,00 | 83.471.522.283,33 | 94,86%  |
| <b>Sasaran Strategis : Meningkatnya pembangunan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim</b> |   |                   |                   |         |
| 58   | Program perencanaan lingkungan hidup  | 230.000.000,00    | 224.673.320,00    | 97,68%  |
| 59   | Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) | 274.848.480,00    | 270.239.036,00    | 98,32%  |
| 60   | Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup   | 1.679.410.056,00  | 1.630.518.156,00  | 97,09%  |
| 61   | Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat                              | 245.407.492,00    | 239.639.396,00    | 97,65%  |
| 62   | Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat   | 357.822.108,00    | 350.027.408,00    | 97,82%  |
| 63   | Program penanganan pengaduan lingkungan hidup   | 122.182.900,00    | 119.113.604,00    | 97,49%  |
| 64   | Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)  | 20.143.744.892,00 | 19.590.900.234,60 | 97,26%  |
| 65   | Program pengelolaan persampahan   | 19.547.083.221,00 | 18.935.828.100,00 | 96,87%  |
| 66   | Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)                | 158.695.539,00    | 149.645.410,00    | 94,30%  |
| 67   | Program penanggulangan bencana  | 6.461.408.350,00  | 6.121.673.930,00  | 94,74%  |
| <b>Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas perlindungan sosial dan daya beli masyarakat</b>                        |   |                   |                   |         |
| 68   | Program perlindungan dan jaminan sosial   | 15.469.396.300,00 | 13.541.075.512,00 | 87,53%  |
| 69   | Program penanganan bencana  | 176.604.000,00    | 127.003.432,00    | 71,91%  |
| 70   | Program pemberdayaan sosial   | 5.279.911.026,00  | 4.777.151.327,00  | 90,48%  |
| 71   | Program rehabilitasi sosial   | 9.624.879.480,00  | 3.714.166.141,00  | 38,59%  |
| 72   | Program pengelolaan taman makam pahlawan  | 127.036.468,00    | 125.314.542,00    | 98,64%  |
| 73   | Program perlindungan khusus anak  | 356.769.422,00    | 308.378.680,00    | 86,44%  |
| 74   | Program Pemenuhan Hak Anak  | 602.500.726,00    | 560.343.625,00    | 93,00%  |
| 75   | Program perlindungan perempuan  | 410.190.250,00    | 296.173.050,00    | 72,20%  |
| 76   | Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting   | 2.892.350.000,00  | 2.857.925.000,00  | 98,81%  |
| 77   | Program standardisasi dan perlindungan konsumen   | 460.000.000,00    | 420.465.014,00    | 91,41%  |
| 78   | Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat   | 1.983.090.892,00  | 1.844.140.799,00  | 92,99%  |



| NO  | URAIAN   | JUMLAH (Rp)       |                   | CAPAIAN |
|---|--|-------------------|-------------------|---------|
|   |  | ANGGARAN          | REALISASI         |         |
| 79  | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian   | 800.189.200,00    | 744.509.907,00    | 93,04%  |
| 80  | Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian  | 38.560.000,00     | 29.000.000,00     | 75,21%  |
| 81  | Program penyuluhan pertanian   | 20.805.000,00     | 19.494.000,00     | 93,70%  |
| 82  | Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner  | 236.617.800,00    | 234.754.047,00    | 99,21%  |
| 83  | Program pengelolaan perikanan budidaya   | 1.862.291.406,00  | 1.853.771.823,00  | 99,54%  |
| 84  | Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan   | 297.624.000,00    | 285.989.440,00    | 96,09%  |
| <b>Sasaran Strategis : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan</b> |  |                   |                   |         |
| 85  | Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan  | 1.187.816.718,00  | 1.150.536.180,00  | 96,86%  |
| 86  | Program peningkatan kualitas keluarga  | 1.148.513.000,00  | 852.602.800,00    | 74,24%  |
| 87  | Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum   | 6.629.043.291,00  | 6.052.276.528,00  | 91,30%  |
| 88  | Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran  | 2.807.182.660,00  | 2.034.582.461,00  | 72,48%  |
| 89  | Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan   | 2.341.265.000,00  | 2.282.171.000,00  | 97,48%  |
| 90  | Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya   | 898.500.000,00    | 809.645.379,00    | 90,11%  |
| 91  | Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial                             | 10.115.964.758,00 | 9.927.394.602,00  | 98,14%  |
| 92  | Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | 47.570.154.040,00 | 47.344.804.040,00 | 99,53%  |
| 93  | Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan  | 346.615.000,00    | 227.615.000,00    | 65,67%  |
| 94  | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan   | 93.738.243.515,00 | 89.244.902.979,85 | 95,21%  |
| 95  | Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum  | 15.308.890.008,00 | 14.573.712.546,00 | 95,20%  |
| 96  | Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum   | 239.136.000,00    | 216.790.000,00    | 90,66%  |
| <b>Sasaran Strategis : Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum</b>       |  |                   |                   |         |
| 97  | Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum   | 3.187.646.092,00  | 1.584.412.880,00  | 49,70%  |
| 98  | Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat  | 2.850.064.000,00  | 2.675.821.546,00  | 93,89%  |
| <b>Sasaran Strategis : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>                |  |                   |                   |         |
| 99  | Program pelayanan penanaman modal  | 1.151.579.340,00  | 1.146.705.754,00  | 99,58%  |
| 100   | Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal   | 545.608.730,00    | 536.270.752,00    | 98,29%  |
| 101   | Program promosi penanaman modal  |                   |                   | 99,22%  |

| NO   | URAIAN   | JUMLAH (Rp)                 |                             | CAPAIAN       |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
|  |  | ANGGARAN                    | REALISASI                   |               |
|  |  | 224.852.000,00              | 223.089.000,00              |               |
| 102  | Program pengelolaan arsip  | 427.310.940,00              | 424.729.225,00              | 99,40%        |
| 103  | Program pendaftaran penduduk                                       | 1.341.442.380,00            | 1.325.953.848,00            | 98,85%        |
| 104  | Program Pencatatan Sipil   | 1.893.368.800,00            | 1.870.540.480,00            | 98,79%        |
| 105  | Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah  | 1.526.129.200,00            | 1.501.702.651,00            | 98,40%        |
| 106  | Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah | 5.251.133.037,00            | 4.970.818.507,00            | 94,66%        |
| 107  | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                         | 1.274.393.825,00            | 1.255.851.663,00            | 98,55%        |
| 108  | Program pengelolaan keuangan daerah                                | 7.130.246.187,00            | 2.427.013.059,00            | 34,04%        |
| 109  | Program pengelolaan barang milik daerah                            | 4.890.041.038,00            | 3.244.280.735,00            | 66,34%        |
| 110  | Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat                      | 23.059.526.200,00           | 21.827.981.003,00           | 94,66%        |
| 111  | Program perekonomian dan pembangunan                               | 2.468.132.512,00            | 2.252.958.071,00            | 91,28%        |
| 112  | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota        | 1.172.592.764.139,00        | 1.094.394.510.497,33        | 93,33%        |
| 113  | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik          | 42.510.769.596,00           | 37.073.096.985,60           | 87,21%        |
| 114  | Program penyelenggaraan pengawasan                                 | 779.508.300,00              | 398.713.500,00              | 51,15%        |
| 115  | Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi            | 425.363.100,00              | 366.364.475,00              | 86,13%        |
| 116  | Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD                 | 50.164.686.511,00           | 40.065.360.724,00           | 79,87%        |
| <b>Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN</b>           |  |                             |                             |               |
| 117  | Program kepegawaian daerah   | 4.869.494.599,00            | 4.410.845.408,00            | 90,58%        |
| 118  | Program pengembangan sumber daya manusia                           | 4.033.659.000,00            | 3.930.848.650,00            | 97,45%        |
| 119  | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota        | 266.388.000,00              | 266.052.471,00              | 99,87%        |
| <b>Sasaran Strategis : Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik</b> |  |                             |                             |               |
| 120  | Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal      | 231.202.250,00              | 229.372.879,00              | 99,21%        |
| 121  | Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan            | 350.084.748,00              | 347.153.560,00              | 99,16%        |
| 122  | Program pengelolaan profil kependudukan                            | 96.500.000,00               | 87.848.600,00               | 91,03%        |
| 123  | Program pengelolaan aplikasi informatika                           | 20.882.840.000,00           | 20.724.278.480,00           | 99,24%        |
| 124  | Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi      | 1.288.092.688,00            | 1.256.943.042,00            | 97,58%        |
| 125  | Program penyelenggaraan statistik sektoral                         | 1.420.948.500,00            | 1.416.658.500,00            | 99,70%        |
| 126  | Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik                | 6.365.502.680,00            | 6.282.388.360,00            | 98,69%        |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>2.620.698.813.849,00</b> | <b>2.455.641.034.188,72</b> | <b>93,70%</b> |

## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama, secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran adalah dalam kategori BERHASIL dengan capaian sebesar 101,51%. Keberhasilan capaian kinerja tersebut merupakan hasil kerja sama yang sinergis antara seluruh Perangkat Daerah, instansi/lembaga terkait, dan masyarakat.

Seluruh capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi, sehingga diketahui langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan dalam meningkatkan capaian kinerja Kota Malang di tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang yang menggambarkan capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian visi dan misi jangka panjang Kota Malang.

Malang, Maret 2025  
WALIKOTA MALANG,  
  
Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, M.M.





## PEMERINTAH KOTA MALANG

### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IWAN KURNIAWAN, S.T., M.M.

Jabatan : Pj. WALIKOTA MALANG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Malang, 27 Agustus 2024  
Pj. WALIKOTA MALANG,  
  
IWAN KURNIAWAN, S.T., M.M.



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PEMERINTAH KOTA MALANG**

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya Masyarakat Terdidik dan Berkarakter  | 1. Rata-rata Lama Sekolah  | 10,96  |
|     |   | 2. Harapan Lama Sekolah  | 15,88  |
| 2.  | Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat  | Angka Harapan Hidup  | 75,32  |
| 3.  | Meningkatnya Daya Saing Masyarakat  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                               | 67,58  |
| 4.  | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif  | Pertumbuhan Ekonomi Kreatif                                      | 5-6%   |
| 5   | Meningkatnya Potensi Pendapatan Asli Daerah   | Rasio PAD  | 0,34   |
| 6.  | Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota Secara Terpadu         | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)                     | 4,52   |
| 7.  | Meningkatnya Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                          | 59,92  |
| 8.  | Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial dan Daya Beli Masyarakat                        | 1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)      | 14,81% |
|     |   | 2. Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>              | 0,884  |
| 9.  | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan                            | 1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)                         | 86,09  |
|     |   | 2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)                               | 95,67  |
| 10. | Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum                                  | Persentase Perda yang ditegakkan                                 | 100%   |
| 11. | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Efisien                    | 1. Nilai SAKIP   | 81,8   |
|     |   | 2. Opini BPK   | WTP    |
|     |   | 3. Maturitas SPIP  | 3,326  |
| 12. | Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN   | Nilai Sistem Merit   | 330    |
| 13. | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik                                 | Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3,82   |

| No. | PROGRAM   | PAGU                 |
|-----|---|----------------------|
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1.242.934.396.038,00 |

| No. | PROGRAM   | PAGU               |
|-----|---|--------------------|
| 2   | Program Pengelolaan Pendidikan  | 240.216.504.694,00 |
| 3   | Program Pengembangan Kurikulum  | 4.000.000,00       |
| 4   | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan  | 152.576.280,00     |
| 5   | Program Pengembangan Kebudayaan   | 1.075.000.000,00   |
| 6   | Program Pengembangan Kesenian Tradisional   | 1.750.000.000,00   |
| 7   | Program Pembinaan Sejarah   | 100.000.000,00     |
| 8   | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya  | 48.000.000,00      |
| 9   | Program Pengelolaan Permuseuman   | 1.063.245.584,00   |
| 10  | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat               | 218.147.859.274,00 |
| 11  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                               | 849.795.400,00     |
| 12  | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                               | 749.154.000,00     |
| 13  | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  | 18.517.621.400,00  |
| 14  | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)   | 1.621.640.000,00   |
| 15  | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                          | 8.074.595.000,00   |
| 16  | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                    | 24.053.998.924,00  |
| 17  | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase                                      | 60.680.573.165,00  |
| 18  | Program Penataan Bangunan Gedung  | 2.654.515.342,00   |
| 19  | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya   | 200.000.000,00     |
| 20  | Program Penyelenggaraan Jalan   | 92.188.586.907,00  |
| 21  | Program Pengembangan Jasa Konstruksi  | 900.000.000,00     |
| 22  | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang  | 3.657.680.020,00   |
| 23  | Program Pengembangan Perumahan  | 3.274.102.080,00   |
| 24  | Program Kawasan Permukiman  | 4.218.126.000,00   |
| 25  | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)                             | 13.629.476.100,00  |
| 26  | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                      | 9.816.689.383,00   |
| 27  | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 2.807.182.660,00   |
| 28  | Program Penanggulangan Bencana  | 6.461.408.350,00   |
| 29  | Program Pemberdayaan Sosial   | 5.279.911.026,00   |
| 30  | Program Rehabilitasi Sosial   | 9.624.879.480,00   |
| 31  | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial   | 15.469.396.300,00  |
| 32  | Program Penanganan Bencana  | 176.604.000,00     |
| 33  | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan  | 127.036.468,00     |
| 34  | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan                                 | 1.187.816.718,00   |
| 35  | Program Perlindungan Perempuan  | 410.190.250,00     |
| 36  | Program Peningkatan Kualitas Keluarga   | 1.148.513.000,00   |
| 37  | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)  | 602.500.726,00     |
| 38  | Program Perlindungan Khusus Anak  | 356.769.422,00     |
| 39  | Program Pengendalian Penduduk   | 280.300.000,00     |
| 40  | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)   | 2.261.185.740,00   |

| No. | PROGRAM   | PAGU              |
|-----|---|-------------------|
| 41  | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)  | 5.819.252.792,00  |
| 42  | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja  | 1.835.245.250,00  |
| 43  | Program Penempatan Tenaga Kerja   | 215.865.000,00    |
| 44  | Program Hubungan Industrial   | 370.584.050,00    |
| 45  | Program Promosi Penanaman Modal   | 224.852.000,00    |
| 46  | Program Pelayanan Penanaman Modal   | 1.151.579.340,00  |
| 47  | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  | 545.608.730,00    |
| 48  | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal   | 231.202.250,00    |
| 49  | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat   | 1.983.090.892,00  |
| 50  | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya  | 1.862.291.406,00  |
| 51  | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan  | 297.624.000,00    |
| 52  | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian  | 800.189.200,00    |
| 53  | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian   | 38.560.000,00     |
| 54  | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner   | 236.617.800,00    |
| 55  | Program Penyuluhan Pertanian  | 20.805.000,00     |
| 56  | Program Perencanaan Lingkungan Hidup  | 230.000.000,00    |
| 57  | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup   | 1.679.410.056,00  |
| 58  | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)  | 20.143.744.892,00 |
| 59  | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                | 158.695.539,00    |
| 60  | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 274.848.480,00    |
| 61  | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                              | 245.407.492,00    |
| 62  | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat   | 357.822.108,00    |
| 63  | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup   | 122.182.900,00    |
| 64  | Program Pengelolaan Persampahan   | 19.547.083.221,00 |
| 65  | Program Pendaftaran Penduduk  | 1.341.442.380,00  |
| 66  | Program Pencatatan Sipil  | 1.893.368.800,00  |
| 67  | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan   | 350.084.748,00    |
| 68  | Program Pengelolaan Profil Kependudukan   | 96.500.000,00     |
| 69  | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)   | 28.807.378.449,00 |
| 70  | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik   | 6.365.502.680,00  |
| 71  | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika  | 20.882.840.000,00 |
| 72  | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral  | 1.420.948.500,00  |
| 73  | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi   | 1.288.092.688,00  |

| No. | PROGRAM  | PAGU              |
|-----|--|-------------------|
| 74  | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi  | 191.450.000,00    |
| 75  | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi   | 204.413.488,00    |
| 76  | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian   | 123.405.000,00    |
| 77  | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi   | 260.945.000,00    |
| 78  | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)                           | 4.130.281.063,00  |
| 79  | Program Pengembangan UMKM  | 693.633.180,00    |
| 80  | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan   | 197.917.600,00    |
| 81  | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan  | 10.634.517.848,00 |
| 82  | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting                                | 2.892.350.000,00  |
| 83  | Program Pengembangan Ekspor  | 53.020.000,00     |
| 84  | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen  | 460.000.000,00    |
| 85  | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri   | 931.904.263,00    |
| 86  | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri   | 22.203.366.628,00 |
| 87  | Program Pengendalian Izin Usaha Industri   | 20.000.000,00     |
| 88  | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional   | 50.000.000,00     |
| 89  | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan   | 3.299.286.428,00  |
| 90  | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan   | 25.915.916.887,00 |
| 91  | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan   | 700.000.000,00    |
| 92  | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  | 1.777.046.012,00  |
| 93  | Program Pemasaran Pariwisata   | 305.415.577,00    |
| 94  | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 224.300.000,00    |
| 95  | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                    | 2.317.016.864,00  |
| 96  | Program Pembinaan Perpustakaan   | 1.174.408.534,00  |
| 97  | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno   | 90.000.000,00     |
| 98  | Program Pengelolaan Arsip  | 427.310.940,00    |
| 99  | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  | 25.909.590.200,00 |
| 100 | Program Perekonomian dan Pembangunan   | 2.468.132.512,00  |
| 101 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD   | 50.164.686.511,00 |
| 102 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah                                  | 1.526.129.200,00  |
| 103 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                 | 5.251.133.037,00  |
| 104 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah   | 1.274.393.825,00  |
| 105 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah  | 7.320.246.187,00  |
| 106 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah  | 4.890.041.038,00  |
| 107 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah  | 13.833.676.256,00 |
| 108 | Program Kepegawaian Daerah   | 4.869.494.599,00  |
| 109 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia   | 4.033.659.000,00  |
| 110 | Program Penyelenggaraan Pengawasan   | 779.508.300,00    |
| 111 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi  | 425.363.100,00    |

| No. | PROGRAM  | PAGU               |
|-----|--|--------------------|
| 112 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  | 42.510.769.596,00  |
| 113 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan   | 181.733.009.996,00 |
| 114 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum   | 15.308.890.008,00  |
| 115 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum   | 239.136.000,00     |
| 116 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | 2.341.265.000,00   |
| 117 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 47.570.154.040,00  |
| 118 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  | 346.615.000,00     |
| 119 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya   | 898.500.000        |
| 120 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                             | 10.115.964.758,00  |

Malang, 27 Agustus 2024

Pj. WALIKOTA MALANG,



IWAN KURNIAWAN, S.T., M.M.



**PEMERINTAH KOTA MALANG**

MENUJU MALANG MBOIS DAN BERKELAS

★  
★  
**2024**  
★

"Dengan sinergi antara kearifan lokal dan inovasi modern, Kota Malang terus melesat sebagai kota berkelas yang tak kehilangan ciri khas 'kera Ngalam'. Setiap langkah pembangunan tahun 2024 adalah bukti kolaborasi warga dan pemerintah dalam menulis sejarah kemajuan yang membumi."



"Tahun 2024 adalah kanvas bagi Kota Malang: di mana infrastruktur cerdas bertemu seni budaya yang abadi, dan kebijakan inklusif lahir dari semangat gotong royong. Kami tak hanya membangun kota, tetapi juga merajut kebanggaan generasi penerus."

# LAPORAN KINERJA

## PEMERINTAH KOTA MALANG



[www.malangkota.go.id](http://www.malangkota.go.id)



Pemerintah Kota Malang



@PemkotMalang